

SKRIPSI

**PENANGGULANGAN KEMISKINAN: ANTARA PEMERINTAH DAN
MASYARAKAT DI KECAMATAN BACUKIKI KOTA PAREPARE
(PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM)**



OLEH

**SITTI HAJRA
NIM. 17.2400.100**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**PENANGGULANGAN KEMISKINAN: ANTARA PEMERINTAH DAN
MASYARAKAT DI KECAMATAN BACUKIKI KOTA PAREPARE
(PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM)**



OLEH

**SITTI HAJRA
NIM: 17.2400.100**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penanggulangan Kemiskinan: antara Pemerintah
dan Masyarakat di Kecamatan Bacukiki Kota
Parepare (Perspektif Ekonomi Islam)

Nama Mahasiswa : Sitti Hajra

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2400.100

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B. 1174/In.39.8/PP.00.9/8/2020

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M.H.

NIP : 19761118 20050 1 1002

Pembimbing Pendamping : Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.

NIP : 19710208 20011 2 2002

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
170730129 200501 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi :Penanggulangan Kemiskinan: Antara Pemerintah dan Masyarakat di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare (Perspektif Ekonomi Islam)

Nama Mahasiswa :Sitti Hajra

Nomor Induk Mahasiswa :17.2400.100

Program studi :Ekonomi Syariah

Fakultas :Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing :Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.1174/In.39.8/PP.00.9/8/2020

Tanggal Kelulusan : 25 Februari 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Zainal said, M.H. (Ketua)

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. (Sekretaris)

Dra. Rukiah, M.H. (Anggota)

Bahtiar, S.Ag., M.A. (Anggota)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. 7
170730129 200501 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tiada kata yang paling indah selain puji dan rasa syukur kepada Allah swt. yang telah menentukan segala sesuatu berada ditangan-Nya, sehingga tidak ada setetes embun pun dan segelintir jiwa manusia yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya. Alhamdulillah berkat hidayah dan inayah-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad saw, keluarga dan sahabat-Nya.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya serta kasih sayang yang tak terhingga untuk kedua orang tua saya tercinta, Tettaku H. Daeng Tombong dan ibu Mirna yang tidak henti-hentinya mendoakan, serta memberikan pengorbanan materi yang sangat besar tanpa mengeluh demi berhasilnya proses perkuliahan penulis.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Zainal Said, M.H. dan ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku pembimbing I dan pembimbing II peneliti, ditengah kesibukan beliau tetap menerima peneliti untuk berkonsultasi, serta selalu membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menyusun skripsi ini, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, peneliti ucapkan terimakasih.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja sebagai pemimpin di kampus tercinta

2. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam beserta jajarannya atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI).
3. Ibu Dr. Rusnaena, M.Ag. selaku ketua Prodi Ekonomi Syariah yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk berkonsultasi masalah nilai dan berbagai hal yang menyangkut masalah jurusan.
4. Bapak H. Islamul Haq Lc. M.A sebagai Penasehat Akademik yang telah banyak membantu dalam penyelesaian Skripsi di IAIN Parepare.
5. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare, yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
6. Drs. Daiyan Indar, Mip, Msi. yang telah banyak berkontribusi dalam penyelesaian skripsi di IAIN Parepare.
7. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Kepada bapak dan ibu pengelola perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah banyak meluangkan waktunya dalam memfasilitasi mencari dan meminjamkan buku yang dibutuhkan untuk mendukung serta melengkapi penelitian penyelesaian secara teoritis pada skripsi penulis.
9. Keluarga besar serta saudara yang selalu memberikan suport kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Sahabat saya Nurisma, S.E , Eka Sari Widyastuti, Andi Irmayanti S.E, Sapnah Agustina, Nurul Ezati, Mutmainnah, Sri Reski Indrayanti dan Nurul Asmi Pratiwi, S.E yang selama ini telah memberikan segenap bantuan, dukungan dan motivasi kepada peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Teman angkatan 2017 Prodi Ekonomi Syariah yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga ikatan persaudaraan dan kekeluargaan kita bisa terus terjalin.
12. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini, mohon maaf penulis tidak bisa menyebutkan satu persatu.

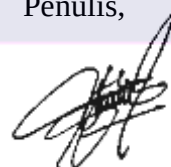
Penulis tak lupa mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebaikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini, karena peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna akan tetapi besar harapan peneliti, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Parepare, 21 Februari 2022

20 Rajab 1443 H

Penulis,



Sitti Hajra

NIM. 17.2400.100

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Sitti Hajra
NIM : 17.2400.100
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 5 Maret 1998
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Penanggulangan Kemiskinan: Antara Pemerintah dan Masyarakat di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare (Perspektif Ekonomi Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 21 Februari 2022

19 Rajab 1443 H

Penyusun,



Sitti Hajra

NIM. 17.2400.100

ABSTRAK

Sitti Hajra, *Penanggulangan Kemiskinan: antara Pemerintah dan Masyarakat di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare Perspektif Ekonomi Islam* (dibimbing oleh Zainal said dan Muzdalifah Muhammadun)

Penelitian ini mengkaji tentang Penanggulangan kemiskinan: antara Pemerintah dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare Perspektif ekonomi islam. terdiri dari sub-sub masalah yang ingin dikaji yaitu: bagaimana wujud penanggulangan kemiskinan, faktor yang mempengaruhi penanggulangan kemiskinan, dan implementasi peran pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan yang bertujuan untuk mengetahui wujud penanggulangan kemiskinan, faktor-faktor yang mempengaruhi penanggulangan kemiskinan serta mengetahui implementasi peran pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, yaitu cara memaparkan informasi-informasi yang diperoleh dari narasumber dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengamatan (observasi), wawancara (interview) dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) ada beberapa wujud penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu diantaranya Perbaikan Rumah, pemberian peralatan menjahit, pemberian alat pertukangan, pemberian alat memasak, dan pemberian alat salon/tata rias. 2) ada dua faktor yang mempengaruhi penanggulangan kemiskinan, yaitu faktor internal datang dari dalam pemerintahan untuk mengatasi kemiskinan dengan melakukan pelatihan-pelatihan sebelum menerima alat bantuan. Sedangkan eksternal dijalankan oleh masyarakat dari luar Pemerintahan yang dimana dilaksanakan oleh Yayasan LPK Buana Mandiri untuk melaksanakan pelatihan menjahit dan tata rias. 3) Implementasi peran pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan di Kelurahan Lompo'e sudah berjalan dengan baik. Adapun yang dilakukan Pemerintah dengan memberikan beberapa bantuan alat usaha kepada masyarakat, kemudian masyarakat memanfaatkan bantuan yang diberikan untuk mendapatkan penghasilan. Namun ada beberapa masyarakat yang mendapatkan bantuan tidak sesuai dengan keahliannya sehingga bantuan yang diberikan dijual. Adapun pengentasan kemiskinan dalam ekonomi Islam menurut Yusuf Qardhawi bertumpu pada instrumen bekerja, pemberian zakat, dan jaminan negara dari beberapa sumber.

Kata Kunci : Pemerintah, Pemberdayaan, penanggulangan kemiskinan, ekonomi Islam

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	6
B. Tinjauan Teori	8
C. Tinjauan Konseptual.....	28
D. Kerangka Pikir.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Penelitian.....	32
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	32
C. Jenis dan Sumber Data	33

D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	34
E. Uji Keabsahan Data	36
F. Teknik Analisis Data.....	37
BAB 1V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Wujud Penanggulangan Kemiskinan	40
B. Faktor yang Mempengaruhi Penanggulangan Kemiskinan.....	48
C. Implementasi Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan.....	52
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan.....	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	V
BIODATA PENELITI	XXXVIII

DAFTAR TABEL

No.	Judul Tabel	Halaman
4.1	Perbaikan Rumah Warga	41
4.2	Penerima mesin usaha menjahit	42
4.3	Penerima bantuan alat pertukangan	45
4.4	Penerima bantuan alat tata rias/ salon	46
4.5	Penerima alat memasak	48

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
2.1	Skema kerangka pikir penelitian	31



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Pedoman Wawancara Penelitian	VI
2.	Data Mentah Penelitian	VIII
3.	Surat keterangan wawancara	X
4.	Surat Izin Penelitian dari Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare	XXVI
5.	Surat Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare	XXVII
6.	Surat Keterangan Selesai Meneliti	XXVIII
7.	Dokumentasi	XXIX
8.	Biodata Peneliti	XXXVIII

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	dh	de dan ha

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (').

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	a	A
إ	Kasrah	i	I
أ	Dammah	u	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	fathah dan ya	ai	a dan i
أَوْ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / آ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُ	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta murbatah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudāh al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al- madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid (ـَـ)*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمَّ : *nu‘‘ima*

عُدُوَّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ى* bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*ـِـ*), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah (i)*. Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalزالah (bukan az-zalزالah)

الْفَلَسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-bilādu

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : ta’murūna

النَّوْءُ : al-nau’

سَيِّءٌ : syai’un

أُمِرْتُ : Umirtu

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

Fī ṣilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-laḥz lā bi khusus al-sabab

i. *Laḥz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ

Dīnullah

بِاللَّهِ

billah

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *laḥz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

Hum fī rahmatillāh

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, alam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika

terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘āla</i>
Saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
QS .../...4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دو	=	بدون مكان

صهعى = صلى الله عليه وسلم

ط = طبعة

دن = بدون ناشر

الخ = إلى آخرها/إلى آخره

خ = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Vol. : Volume, Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkla seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidak mampuan seseorang secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, papan. Kemampuan pendapatan yang rendah juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan. Suryawati mengatakan bahwa

kondisi masyarakat yang disebut miskin dapat dilihat berdasarkan jumlah pendapatan dalam memenuhi standar hidupnya. Pada prinsipnya, standar hidup di suatu masyarakat tidak sekedar tercukupinya kebutuhan akan pangan, akan tetapi juga tercukupinya kebutuhan akan kesehatan maupun pendidikan . tempat tinggal ataupun pemukiman.¹

Gejala tersebut diatas menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan salah satu dari standar hidup atau standar kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Berdasarkan kondisi ini, suatu masyarakat disebut miskin apabila memiliki pendapatan jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan sehingga tidak banyak memiliki kesempatan untuk mensejahterahkan dirinya.

Kebijakan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan diatur dalam, Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan

¹ Suryawati, Teori Ekonomi Mikro.UPP. AMP YKPN, (Yogyakarta: Jarnasy, 2004), h.122

dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik.²

Penjelasan kemiskinan jelas diatur dalam perundang-undangan dan selanjutnya dilaporkan pada kementerian bidang kesejahteraan rakyat, yang menjelaskan bahwa tingkat kemiskinan bukan saja pada tenaga kerja pengangguran tetapi juga pada tingkat tenaga kerja yang berpenghasilan rendah.

Undang-undang mengamanatkan bahwa pemerintah bertanggung jawab menanggulangi serta menguranginya merupakan tugas negara untuk menghapuskan kemiskinan dan meratakan distribusi kekayaan, sehingga tercapailah keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Agama Islam adalah agama yang mengatur segenap aspek dalam kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat, salah satunya tentang kemiskinan. Karena itulah Islam diturunkan guna merealisasikan kemakmuran, keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat, serta menghapuskan kemiskinan dan kesenjangan dalam masyarakat.

Kemiskinan terjadi karena ketidakberdayaan masyarakat untuk keluar dari lingkaran kemiskinan yang dihadapinya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah sangat berperan sebagai bagian

²https://www.kompasiana.com/amp/susanadevi/5c76fb1f43322f34bf2ed664/basmi-mental-miskin-untuk-putuskan-rantai-kemiskinan-di-indonesia#aoh=16202255293953&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=Dari%20%251%24s , (diakses tanggal 5 mei 2021, 22.49)

utama dari berbagai strategi kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah tentang bagaimana memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat sehingga dipandang perlu untuk diberdayakan.

Pemberdayaan masyarakat dalam program pemerintah yaitu berupaya menguatkan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM) kegiatan pemberdayaan ini dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudian perisinan dan selanjutnya penguatan kelembagaan. Program ini telah terlaksana, di kelurahan Lompo'e di kecamatan Bacukiki Kota Parepare melalui berbagai kegiatan antara lain: perbaikan rumah warga miskin, bantuan kebutuhan seragam sekolah, penguatan modal usaha, serta berbagai program peningkatan Sumber daya manusia melalui berbagai pelatihan keterampilan dan selanjutnya diberikan peralatan kerja (usaha) misalnya mesin jahit, peralatan penganan kue, peralatan pertukangan, dll. dalam hal ini tingkat kemiskinan masyarakat yang ada di kelurahan Lompo'e kecamatan bacukiki sangatlah beragam antara lain: pendidikan sebagian besar SD, jumlah anggota rata-rata 3-5 orang, tidak mempunyai keterampilan, sebagian besar masih menggunakan bahan bakar utama kayu, pekerjaan buruh / petani tidak tetap.

Hal yang menarik yang ditemukan pada pra penelitian sebagian masyarakat marginal kelihatannya tidak jauh berbeda pada tahun sebelumnya, hal ini menunjukkan bahwa tingkat penurunan masyarakat prasejahtera tidak terlalu signifikan terhadap program pengentasan kemiskinan. Hasil wawancara dengan Amalia mengatakan bahwa

Beberapa program yang diterapkan sebagian besar pada masyarakat tidak menyentuh sampai ketinggian bawah.³

Mencermati hasil wawancara di atas dan dikaitkan dengan program pemerintah yang setiap tahunnya dilaksanakan kelihatannya kurang tepat sasaran demikian juga dengan program pemerintah yang berupa Bantuan Langsung Tunai, bantuan beras untuk rakyat miskin, dan subsidi lainnya keseluruhannya ini hanya bersifat temporer yang pengaruhnya tidak terlalu besar korelasinya terhadap pengentasan kemiskinan.

Menanggapi hal tersebut maka peneliti tertarik ingin mengetahui sejauh mana peran Pemerintah dalam mewujudkan penanggulangan kemiskinan serta faktor yang mempengaruhinya dalam implementasi peran pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di kecamatan Bacukiki Kota Parepare.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan pada permasalahan, maka rumusan masalah pokok yang diajukan sebagai berikut:

1. Bagaimana wujud penanggulangan kemiskinan antara Pemerintah dan Masyarakat di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare ?
2. Faktor apa yang mempengaruhi penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare?
3. Bagaimana implementasi peran pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare ?

³Amalia, masyarakat Kecamatan Bacukiki, wawancara dilakukan di Kelurahan Lompo'e, Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, Tanggal 9 November 2021

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana wujud penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare.
3. Untuk mengetahui bagaimana implementasi peran pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian ilmiah bagi mahasiswa dan akademisi sebagai referensi untuk melanjutkan penelitian ini serta memberikan gambaran pengaruh penanggulangan kemiskinan bagi lembaga-lembaga yang terkait untuk mengajukan program pengentasan kemiskinan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan cakrawala peneliti selanjutnya dan sebagai referensi bagi mahasiswa dalam penelitian karya ilmiah serta sebagai bahan proses perkuliahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Peneliti pertama Referensi Liyana Apriyanti Universitas Diponegoro dengan judul “Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Kemiskinan Kota Semarang”.⁴

Peneliti diatas lebih jauh membahas tentang Kasus Implementasi Program dana Bergulir, dengan menganalisis tentang pinjaman yang diterapkan oleh pemerintah dalam program kegiatan PNPM (program nasional pemberdayaan masyarakat Mandiri) pada masyarakat Perkotaan peneliti beranggapan bahwa dengan cara memutus lingkaran setan kemiskinan, melalui pinjaman modal usaha untuk warga miskin yang tergabung dalam KSM (kelompok swadaya masyarakat) .

Peneliti pertama menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang sama dengan apa yang kami teliti yaitu tentang masyarakat pra sejahtera, disisi lain peneliti ini lebih terfokus pada pinjaman modal melalui kegiatan PNPM dengan program penguatan modal pada Kelompok Swadaya Masyarakat. Untuk memutus lingkaran setan kemiskinan, Perbedaan yang mendasar yang kami teliti yaitu tentang perencanaan program dalam implementasi pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh pemberdayaan masyarakat pada unit kerja pemerintah daerah tentang masyarakat miskin.

Peniliti kedua Apinus Janambani pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa dengan judul “Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Muja-Muju Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta”⁵

⁴Liyana apriyanti, “*Analisis program pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan dikota semarang*”, skripsi: fakultas Ekonomi universitas Diponegoro semarang, 2011, h.4 .

⁵Aipnus janambani, “*implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di kelurahan muja muju kecamatan ambulharjo yogyakarta*” skripsi: Program Studi Ilmu Sosiatri/Pembangunan Sosial Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (APMD)Yogyakarta, 2018

Peneliti kedua ini lebih jauh membahas tentang Karakteristik program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga yaitu pemenuhan hak dasar utama individu dan rumah tangga miskin disisi lain juga dibahas tentang program berbasis pemberdayaan dengan pendekatan partisipatif untuk mendorong penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam Program Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan modal, melalui program kegiatan peningkatan keterampilan serta manajemen usaha. Serta bagi masyarakat miskin yang belum mempunyai usaha atau terlibat dalam kegiatan ekonomi.

Mencermati referensi peneliti kedua jika dikaitkan dengan apa yang peneliti teliti pada umumnya bagaimana cara penanggulangan kemiskinan melalui program pemberdayaan masyarakat namun pada peneliti ini lebih dominan mengarah kepada usaha ekonomi makro dan kecil serta bagi masyarakat prasejahtera yang belum memiliki kegiatan-kegiatan usaha. Hal lain perbedaan yang kami teliti yaitu sejauh mana penerapan program pengentasan kemiskinan yang dikelola oleh badan pemberdayaan masyarakat terhadap penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran .

Peneliti ketiga Muhammad Iqbal pada Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan judul “Peranan Pemerintah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kota Jambi”⁶.

Peneliti mencermati bahwa pada kajian referensi ke tiga ini lebih jauh memberikan gambaran tentang anggaran penanggulangan kemiskinan yang dikelola disetiap unit kerja terkait tentang pendapatan asli daerah, hal lain pada pembahasan anggaran lebih mengutamakan pemanfaatan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan yang mendesak olehnya itu pada skripsi ini dalam menetapkan program anggaran kemiskinan tergantung dari seberapa besar dana yang dapat di himpun melalui

⁶Muhammad iqbal, “Peranan Pemerintah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kota Jambi” skripsi: program studi ekonomi syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2018

pendapatan asli daerah, serta beberapa anggaran yang dikombinasikan melalui dana alokasi umum (DAU) temuan pada peneliti ini yaitu sejauh mana program pemerintah tentang pengentasan kemiskinan dapat memecahkan persoalan kemiskinan. Hal yang sangat mendasar pada referensi ketiga ini hanya membahas tentang program pengentasan kemiskinan serta kemampuan penganggaran pemerintah daerah sementara yang kami teliti yaitu sejauh mana implementasi program penerapan kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap pengentasan kemiskinan.

B. Tinjauan Teori

1. Kemiskinan

a. Definisi Kemiskinan

Kemiskinan adalah ketidak mampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kemampuan yang dimaksud disini bukan hanya kemampuan individu itu sendiri, tetapi juga dalam konteks keluarga, artinya meskipun kemiskinan merupakan atribut bagi individu yang bersangkutan tapi pada kenyataannya keadaan tersebut terkait erat dengan kondisi keluarga. oleh karena itu kemiskinan penduduk dapat juga dikelompokkan menjadi penduduk atau individu miskin dan keluarga miskin.⁷

Pemahaman tersebut diatas mengisyaratkan bahwa seseorang yang disebutkan miskin pada dasarnya merupakan orang yang memiliki kekurangan sumberdaya-sumberdaya material ketika akan terlibat dalam aktivitas-aktivitas sosial yang ada, atau seseorang yang tidak memiliki kesempatan untuk memperoleh keuntungan atau standar hidup yang kurang layak, olehnya itu konsep kemiskinan masih didominasi

⁷<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj0nP2p43uhVNfisKHbFZDZIQFjAAegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Ffontar.ui.ac.id%2Ffile%3Ffile3Ddigital%2F131538-T%2B27584Strategi%2BuntukTinjauan%2Bliteratur.pdf&usg=AOvVaw1AaenykicLsrEElgBl8xyr> (di akses pada tanggal 16 februari 2021, 14.30)

olehsuatusudut pandang, yakni “kemiskinan pendapatan”. Pemahaman seperti ini sebagian besar menggambarkan potret kemiskinan secara utuh. Kemiskinanseakan-akan hanya masalah ekonomi yang dilihat pada rendahnya pendapatan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Mengacu pada uraian tersebut diatas, bahwa kemiskinan dipandang sebagai ketidak mampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diukur dari sisi pengeluaran, konsep kemiskinan mempunyai ruang lingkup yang berbeda antara lain kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. Lebih lanjut gambaran tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. sedangkan kemiskinan absolut ditentukan berdasarkan ketidak mampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk memenuhi kehidupan, Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin.

Kemiskinan juga dapat digambarkan sebagai kondisi yang serba kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia, yaitu meliputi kebutuhan sandang, pangan, papan pendidikan dan kebutuhan akan kesehatan. Penduduk miskin yangtidak berdaya dalam memenuhi kebutuhannya dikarenakan mereka tidak memiliki aset sebagai sumber pendapatan, juga karena struktur sosial ekonomi tidak membuka peluangorang miskin keluar dari lingkungan kemiskinan yang tidak berujung pangkal.

Kemiskinan Menurut Kementerian Sosial, berdasarkan surat Keputusan Menteri Sosial RI No.146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, yaitu:

- 1) Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.
- 2) Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana.
- 3) Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi Pemerintah.
- 4) Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga.
- 5) Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.
- 6) Mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok/ dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok tidak dipleset.
- 7) Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah.
- 8) Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah.
- 9) Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran.
- 10) Luas lantai rumah kecil kurang dari 8 meter persegi/orang.

11) Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air/sungai/air hujan/lainnya.⁸

b. Kategori kemiskinan

Kategori kemiskinan merupakan konsep pemikiran yang dapat disederhanakan. Pertama, dari sudut pandang pengukuran, kemiskinan dibedakan menjadi dua yaitu kemiskinan absolut dan relatif. Keduadari sudut pandang penyebab, kemiskinan dapat dikelompokkan menjadi kemiskinan alamiah dan struktural. Salah satu syarat penting agar suatu kebijakan pengentasan kemiskinan dapat tercapai maka harus ada kejelasan mengenai kriteria tentang siapa atau kelompok masyarakat mana yang masuk ke dalam kategori miskin dan menjadi sasaran program.

Syarat lain yang juga harus dipenuhi yaitu harus dipahami secara tepat mengenai penyebab kemiskinan itu sendiri di masing-masing komunitas di pedesaan. Karena penyebab ini tidak lepas dari adanya pengaruh nilai-nilai lokal

Yang melingkupi kehidupan masyarakatnya. Kemiskinan seringkali ditandai dengan tingginya tingkat pengangguran dan keterbelakangan. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya terhadap kegiatan ekonomi sehingga akan tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi. “Ukuran kemiskinan dilihat dari tingkat pendapatan dapat dikelompokkan menjadi kemiskinan absolut dan kemiskinan relative” Lebih lanjut dikatakan Seseorang miskin secara absolut apabila pendapatannya lebih rendah dari garis

⁸<https://www.banjarsari-labuhanhaji.desa.id/artikel/2020/4/14/kriteria-fakir-miskin-dan-orang-tidak-mampu-menurut-kemensos>, di akses tanggal 3 april 2021, jam 20.13

kemiskinan atau dengan istilah lain jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum.⁹

Pemahaman tersebut diatas menunjukkan bahwa kategori kemiskinan bukanlah sekedar faktor yang terdapat dalam masyarakat saja namun karena kurangnya modal, pendidikan yang rendah, kepadatan penduduk dan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup sementara pemahaman tentang kemiskinan absolute dan kemiskinan relative hanya merupakan atribut kemiskinan saja karena kemiskinan itu sendiri berakar dari ketidak mampuan masyarakat untuk merubah pola hidupnya.

Menurut Robert Chambers kriteria kemiskinan ada lima yaitu:

Pertama, kemiskinan (*proferty*), situasi orang miskin mempunyai tanda-tanda sebagai berikut; pertama rumah mereka reot dan di buat dari bahan bangunan yang bermutu rendah, perlengkapan yang sangat minim. Ekonomi keluarga bercirikan gali lubang tutup lubang. *Kedua*, pendapatan mereka tidak menentu dan sangat rendah.

Kedua, fisik yang lemah (*fhyscal weakness*); kelemahan fisik keluarga miskin disebabkan oleh beberapa hal seperti tidak adanya seorang laki-laki sehat yang menjadi kepala keluarga, terpaksa dikepalai seorang perempuan yang di samping bekerja mengurus pekerjaan rumah sehari-hari, juga harus bekerja untuk menghidupi keluarga. Akibatnya keluarga miskin lemah secara fisik akibat rendahnya gizi, beban kerja terlalu berat dan interaksi berbagai bibit macam penyakit akibat kemiskinan.

⁹Nunung Nurwati, *Kemiskinan :Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan*, Jurnal Kependudukan Padjadjaran, Vol.10, No.1, Januari 2008:1 -11, h.3

Ketiga, keterasingan (isolation). Kelompok miskin dapat terasing karna tempat tinggalnya yang secara geografis terasing atau karena mereka tidak memiliki akses terhadap sumber-sumber informasi.

Keempat, kerentanan (vulnerability). Dalam menghadapi paceklik keluarga miskin mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka dengan menjual barang-barang yang dimiliki dan laku dijual, utang pada tetangga yang lebih mampu, atau mengurangi makan mereka baik dari segi jenis dan frekuensinya. Keadaan darurat membuat tidak hanya membuat keluarga miskin menjadi lebih miskin, tetapi juga rawan dari berbagai macam penyakit, yang tidak jarang dapat membawa kematian.

Kelima, ketidakberdayaan (powerlessness). Orang miskin tidak berdaya menghadapi rentenir atau orang-orang lain yang sering mengeksploitasi mereka. Mereka juga tidak berdaya menghadapi polisi atau aparat negara lain yang sering tidak ramah terhadap mereka.¹⁰

c. Strategi penanggulangan kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu masalah utama dalam persoalan kemasyarakatan. Teori ekonomi pada umumnya mengatakan bahwa untuk memutuskan mata rantailingkaran kemiskinan dapat dilakukan dengan berbagai strategi, meningkatkan keterampilan sumberdaya manusianya, penambahan modal investasi dan mengembangkan teknologi melalui berbagai suntikan pendanaan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas. Menurut Suharto, untuk mengatasi kemiskinan diperlukan sebuah kajian yang lengkap sebagai acuan perancangan kebijakan dan program anti kemiskinan, dan hampir semua pendekatan

¹⁰Wildana Wargadinata, *Islam & pengentasan Kemiskinan* (Malang, UIN-Maliki Press, 2011), h.20.

yang mengkaji masalah kemiskinan bersandar pada teori-teori pertumbuhan ekonomi neo klasik dan model yang berpusat pada produksi.

Pembangunan sering kali dianggap sebagai suatu penanggulangan terhadap berbagai masalah yang muncul dalam masyarakat, khususnya pada negara yang sedang berkembang. Permulaan implementasi pendekatan pembangunan, menjelaskan bahwa pembangunan sebagai pertumbuhan ekonomi akhirnya diasumsikan akan meningkatkan standar kehidupan masyarakat sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan, tetapi jika diperhatikan lebih jauh ternyata pertumbuhan yang ada hampir tidak bermakna bagi masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan, dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ada beberapa pendekatan pembangunan, antara lain: pendekatan pertumbuhan, pendekatan ketergantungan dan pemerataan serta tata ekonomi baru dalam kebutuhan pokok.¹¹

Strategi penanggulangan kemiskinan didukung oleh berbagai program yang kegiatannya tertuan dalam sektor penanggulangan kemiskinan antara lain Sektor pertanian, memiliki peranan penting di dalam pembangunan karena sektor tersebut memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pendapatan masyarakat di pedesaan berarti akan mengurangi jumlah masyarakat miskin. Terutama sekali teknologi disektor pertanian dan infrastruktur. Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sumberdaya manusia merupakan investasi insani yang memerlukan biaya yang cukup besar, diperlukan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum, maka dari itu peningkatan lembaga pendidikan, kesehatan dan gizi merupakan langka yang baik untuk diterapkan oleh

¹¹Jenal Abidin1, Rina Octaviani2, dan Fredian Tonny Nasdian, *Penanggulangankemiskinan melalui pengembanganpertanian di kabupaten Bogor , studi kasus di kecanatan Pemijahan dan Leuwiliang*, Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah, Volume 5 Nomor 2, Oktober 2013, h.80.

pemerintah. Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat, Mengingat LSM memiliki fleksibilitas yang baik dilingkungan masyarakat sehingga mampu memahami komunitas masyarakat dalam menerapkan rancangan dan program pengentasan kemiskinan.

2. Pemberdayaan Masyarakat

a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Menurut James dalam buku Deny Nofriansyah, mengatakan bahwa “pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri, “Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila warganya ikut berpartisipasi”.¹²

Pemahaman tersebut diatas memberikan gambaran bahwa suatu usaha hanya berhasil dinilai sebagai pemberdayaan masyarakat apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut terlibat dan ikut serta dalam suatu proses penentuan program dalam pengambilan kebijakan Ahmad Suhaimi lebih lanjut mengatakan bahwa masyarakat dikenal juga sebagai subjek. Disini subjek merupakan motor penggerak, dan bukan penerima manfaat atau objek saja olehnya itu Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat, mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri.¹³ Masyarakat sebagai subjek pada kutipan ini menunjukkan bahwa dalam proses lembaga berperan sebagai fasilitator yang mendampingi kegiatan pemberdayaan masyarakat, sehingga prinsipnya masyarakatlah yang menjadi aktor

¹²Deny Nofriansyah, *penelitian kualitatif analisis kinerja lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan*, (yogyakarta:deepublish, 2018) h.28.

¹³H. Ahmad Suhaimi, *pengembangan & pemberdayaan masyarakat konsep pembangunan partisipatif wilayah pinggiran dan desa*, (yogyakarta:deepublish, 2016) h.40

dan penentu pembangunan. Usulan-usulan masyarakat merupakan dasar bagi program pembangunan lokal, regional, bahkan menjadi titik bijak bagi program.

Konsep pemberdayaan yang berbasis perspektif lebih luas jika diartikan dalam partisipasi perorangan, yang menggambarkan sebagaimana individu memilih maupun mengontrol aspek dalam program pembangunan, serta akses terhadap sumber daya yang berpartisipasi pada proses pembuatan keputusan sosial. Pemberdayaan merupakan suatu proses perluasan asset dan kemampuan orang miskin/lemah untuk berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi, serta mengontrol setiap kebijakan pemerintah, sedangkan pendekatan pemberdayaan dapat mengembangkan kekuatan bagi masyarakat pada inisiatif serta motivasi penyelesaian masalah, sehingga menghasilkan sumber daya dan reaksi keluar dari kemiskinan, yang menunjukkan bahwa kekuatan lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai mitra kerja Pemerintah Kelurahan, sehingga berpartisipasi dalam mengelola, merencanakan dan melaksanakan pembangunan dengan menggali melalui swadaya gotong royong masyarakat.

Usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Kelurahan dalam posisi tawar menawar masyarakat antarpelaku pembangunan dalam hal ini pemerintah serta lembaga pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan potensi masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh warga masyarakat melalui kegiatan-kegiatan swadaya. Maka masyarakat dapat mandiri, berswadaya, mampu mengadopsi inovasi dan memiliki pola pikir yang berkopetensi, disisi lain Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat kelurahan sehingga masyarakat kelurahan mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk

memberdayakan dirinya yang ditandai oleh tiga ciri utama yakni : Pertama masyarakat yang mandiri secara ekonomi mengandung makna bahwa anggota masyarakat secara ekonomi dapat menghidupi dirinya dan keluarganya dengan pendapatan sendiri atau usaha sendiri. Kedua bebas secara politik yaitubebas memberikan suaranya dalam pemilu, bebas berupaya memperoleh keuntungan politik. Serta manusia yang berdaya yaitu mampu menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa bantuan dan pertolongan dari pihak lain.

b. Proses Pemberdayaan Masyarakat

Pranarka dan Vidhyandika dalam Ahmad suhaini menjelaskan bahwa proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama, proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuatan, kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya.

Yang dimaksud dengan masyarakat berdaya adalah masyarakat yang tahu, mengerti, paham termotivasi, berkesempatan, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerja sama, tahu berbagai alternatif, mampu mengambil keputusan, berani mengambil risiko, mampu mencari dan menangkap informasi dan mampu bertindak sesuai dengan situasi.¹⁴ Proses pemberdayaan yang melahirkan masyarakat yang memiliki sifat seperti yang diharapkan harus dilakukan secara berkesinambungan dengan mengoptimalkan pasrtisipasi masyarakat secara bertanggung jawab.

United nations mengemukakan proses-proses pemberdayaan masyarakat sebagai mana dikutip dalam Muhammad Nur Muqouwis adalah sebagai berikut:

¹⁴Deny Nofriansyah, *penelitian kualitatif analisis kinerja lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan*, h .29.

1) Mengetahui masyarakat lokal

Mengetahui karakteristik masyarakat setempat (lokal) yang akan diberdayakan, termasuk perbedaan karakteristik yang membedakan masyarakat desa yang satu dengan yang lainnya. Mengetahui artinya untuk memberdayakan masyarakat diperlukan hubungan timbal balik antara petugas dan masyarakat.

2) Merangsang masyarakat untuk menyadari bahwa mereka memiliki masalah

Di dalam masyarakat yang terikat terhadap adat kebiasaan, sadar atau tidak sadar mereka tidak merasakan bahwa mereka punya masalah yang perlu di pecahkan. Karena itu, masyarakat perlu pendekatan persuasif agar mereka sadar bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan, dan kebutuhan yang perlu dipenuhi.

3) Membantu orang untuk mendiskusikan masalah mereka

Memberdayakan masyarakat bermakna merangsang masyarakat untuk mendiskusikan masalahnya serta merumuskan pemecahannya dalam suasana kebersamaan.

4) Membantu orang untuk mengidentifikasi masalah mereka yang paling mendesak

Masyarakat perlu diberdayakan agar mampu mengidentifikasi permasalahan yang paling menekan. Masalah yang paling menekan inilah yang harus diutamakan pemecahannya.

5) Menumbuhkan kepercayaan diri

Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah membangun rasa percaya diri masyarakat. Rasa percaya diri merupakan modal utama masyarakat untuk berswadaya.

6) Memutuskan tindakan program

Masyarakat perlu diberdayakan untuk menetapkan suatu program yang akan dilakukan. Program action tersebut perlu ditetapkan menurut skala prioritas, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Pentingnya program dengan skala prioritas tinggilah yang perlu didahulukan pelaksanaannya

7) Pengakuan kekuatan dan sumber daya

Memberdayakan masyarakat berarti membuat masyarakat tahu dan mengerti bahwa mereka memiliki kekuatan dan sumber daya yang dapat dimobilisasi untuk memecahkan permasalahan dan memenuhi kebutuhannya.

8) Membantu orang untuk terus bekerja dalam memecahkan masalah mereka

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan. Karena itu, masyarakat perlu diberdayakan agar mampu bekerja memecahkan masalahnya secara kontinu

9) Meningkatkan kemampuan orang untuk membantu diri sendiri

Salah satu tujuan pemberdayaan masyarakat adalah tumbuhnya kemandirian masyarakat. Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang sudah mampu menolong diri sendiri. Untuk itu, perlu selalu ditingkatkan kemampuan masyarakat untuk berswadaya.¹⁵

c. Tujuan dan Langkah-Langkah Pemberdayaan

Upaya pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk membuat masyarakat menjadi mandiri, dalam arti memiliki potensi untuk mampu memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi, dan sanggup memenuhi kebutuhannya dengan tidak

¹⁵Muhammad Muqouwiz, *pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan konsep & aplikasi dari PKMD hingga desa siaga*, (bandar lampung: yayasan bina masyarakat mandiri, 2017) h.59.

menggantungkan hidup mereka pada bantuan pihak luar, baik pemerintah maupun organisasi organisasi non pemerintah. bantuan *tehnical assistance* jelas mereka perlukan, akan tetapi bantuan tersebut harus mampu membangkitkan prakarsa masyarakat untuk membangun bukan sebaliknya mematikan prakarsa. Dalam hubungan ini, kita dituntut menghargai hak hak masyarakat yaitu *right of self - determination* dan *right for equal opportunity*.¹⁶ Hak untuk menentukan sendiri memilih apa yang terbaik untuk masyarakat, serta hak untuk memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang sesuai dengan potensi-potensi yang mereka miliki.

Pemberdayaan masyarakat mempunyai spektrum yang luas untuk ikut dalam pemberdayaan yang dapat dilaksanakan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Merancang keseluruhan program

Merancang program yang termasuk di dalamnya adalah kerangka waktu kegiatan, ukuran program, serta memberikan perhatian kepada kelompok masyarakat pinggiran. Perencanaan program dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipatoris. Agen perubahan (pemerintah dan LSM) dan masyarakat bersama-sama menyusun perencanaan. Perencanaan partisaporis dapat mengurangi terjadinya konflik yang mungkin muncul antara kedua pihak selang program berlangsung dan sesudah program dievaluasi.

- 2) Menetapkan tujuan

¹⁶H.Ahmad Suhaimi, *pengembangan dan pemberdayaan masyarakat konsep pembangunan partisipatif wilayah pinggiran dan desa*, h.55.

Tujuan promosi kesehatan biasanya dikembangkan pada tahap perencanaan dan biasanya berpusat pada mencegah penyakit, mengurangi kesakitan dan kematian dan manajemen gaya hidup melalui upaya perubahan perilaku yang secara spesifik berkaitan dengan kesehatan. Tujuan pemberdayaan biasanya berpusat pada bagaimana masyarakat dapat mengontrol keputusannya yang berpengaruh pada kesehatan dan kehidupan masyarakat.

3) Memilih strategi pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang terdiri dari lima pendekatan yaitu pemberdayaan, pengembangan kelompok kecil, pengembangan dan pengorganisasian masyarakat, pengembangan dan penguatan jaringan antar organisasi dan tindakan politik. Strategi pemberdayaan meliputi: pendidikan masyarakat, fasilitas kegiatan yang berasal dari masyarakat sebagai prasyarat pokok tumbuhnya tanggungjawab sebagai anggota masyarakat, fasilitas upaya mengembangkan jejaring masyarakat, serta advokasi kepada pengambilan keputusan.¹⁷

3. Penanggulangan Kemiskinan dalam Ekonomi Islam

Dalam program penanggulangan kemiskinan pemerintah daerah merencanakan berbagai program yang berbasis Penanggulangan kemiskinan tentang peluang peningkatan kebutuhan hidup, baik dari bentuk program pemerintah pusat, maupun pola baru hasil susunan pemerintah daerah, serta dukungan dari swasta di daerah, dalam program peningkatan penanggulangan kemiskinan ini merupakan prioritas utama dalam program pembangunan. bertujuan untuk mengurangi jumlah

¹⁷H. Ahmad Suhaimi, *pengembangan & pemberdayaan masyarakat konsep pembangunan partisipatif wilayah pinggiran dan desa*, h. 58-61.

masyarakat miskin. Karena masyarakat merasa terbantu, sebagaimana dikatakan dalam Al-Qur'an di Qs. Al-Maidah Ayat 2 :

وَالْعُدْوَانِ الْإِثْمِ عَلَى تَعَاوُنُوا وَلَا

Terjemahnya:

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.¹⁸

Ayat ini memberikan pemahaman bahwa implementasi program yang dilaksanakan oleh pemerintah merupakan jembatan bagi masyarakat berupaya untuk meningkatkan taraf hidup serta pemenuhan kebutuhan hidup.

Penanggulangan kemiskinan pada akhirnya juga menjadi aspek pembangunan yang tidak dapat dipisahkan karena pertumbuhan ekonomi yang dicapai tidak secara otomatis mengurangi angka kemiskinan tetapi malah yang terjadi adalah tingkat kesenjangan yang semakin tinggi. Karena beragamnya sifat tantangan yang ada, maka penanganan persoalan kemiskinan harus menyentuh dasar sumber dan akar persoalan yang sesungguhnya, baik langsung maupun tak langsung. Lebih lanjut dalam Kebijakan penanggulangan kemiskinan menurut Sumodiningrat digolongkan dalam 3 kelompok, yaitu (1) kebijaksanaan yang secara tidak langsung mengarah pada sasaran tetapi memberikan dasar tercapainya suasana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi penduduk miskin, (2) kebijaksanaan yang secara langsung mengarah pada peningkatan kegiatan ekonomi kelompok sasaran, dan (3) kebijaksanaan khusus yang menjangkau masyarakat miskin dan daerah terpencil melalui upaya khusus¹⁹.

¹⁸Al-Qur'an Kemenag in word 2019

¹⁹Subiyana, dkk, "implementasi program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan dalam penanggulangan kemiskinan", *jurnal of management*, vol. 2 , no. 2, maret 2016 , h. 6.

Konsep kebijakan yang dimaksud Sumodiningrat menunjukkan bahwa kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam Penanggulangan Kemiskinan, pada dasarnya merupakan suatu proses yang dijalankan dengan kesadaran dan partisipasi penuh dari para pihak untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat sebagai sumber daya pembangunan agar mampu mengenali permasalahan yang dihadapi sehingga program yang ditetapkan tepat sasaran antara lain:

a. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian. Sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktifitasnya. Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah. Namun, definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompatibel dan tidak universal. Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang apriori (apriory judgement) benar atau salah tetap harus diterima²⁰.

Kemiskinan maupun kekayaan pada dasarnya merupakan ujian bagi seorang muslim di dunia. Miskin dan kaya bukan ukuran seseorang hina atau mulia. Kemiskinan dan kekayaan keduanya sama sama merupakan cobaan dan ujian bagi seorang hamba. Orang yang miskin diuji dengan ke fakirannya, apakah ia dapat

²⁰Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h.14

bersabar atau tidak. Sementara orang kaya diuji dengan kekayaannya, apakah ia dapat bersyukur ataukah tidak terhadap nikmat Allah ta'ala.

b. Pengukuran Kemiskinan dalam Ekonomi Islam

Korayem dan mashhour menjelaskan mengenai kebutuhan hidup manusia didunia dan hubungannya dengan kemiskinan. Mereka menyatakan bahwa dalam mengestimasi kemiskinan ilmu ekonomi sekuler (konvensional) dan ilmu ekonomi islam berbeda, kemiskinan dalam ekonomi konvensional di estimasi dengan melihat siapa yang hidupnya berada di bawah garis kemiskinan, sedangkan kemiskinan dalam ekonomi islam di estimasi dengan tingkat kecukupan, barang siapa yang hidup di bawah tingkat kecukupan itu tergolong miskin. Tingkat kecukupan disini dapat dilihat dari terpenuhinya tujuan tujuan syariah (maqashid al-syari'ah), yaitu: terlindunginya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.²¹

c. Konsep Penanggulangan Kemiskinan berbasis Ekonomi Islam

Qardhawi menggagas konsep pengentasan kemiskinan yang bertumpu pada instrumen:

- 1) bekerja
- 2) jaminan dari family dekat yang mampu
- 3) zakat
- 4) jaminan negara dari berbagai sumbernya
- 5) hak hak selain zakat
- 6) derma suka rela/ filan tropi.²²

²¹Muhammad Iqbal, "konsep pengentasan kemiskinan dalam ekonomi islam", *junal ilmiah*, 2017, h.12.

²²Muhammad Iqbal, "konsep pengentasan kemiskinan dalam ekonomi islam", *junal ilmiah*, 2017, h.15.

Selain itu dalam gagasannya qardhawi juga memberikan gagasan mengenai solusi untuk mengatasi hambatan bagi orang fakir miskin yang kesulitan untuk menjalankan aktivitas pengentasan kemiskinan dengan bekerja. Qardhawi mensyaratkan agar gagasan ini dapat bekerja maka masyarakat dan negara harus menjalankan syariat islam secara kaffah (menyeluruh).

Peran kolektif masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan dalam ekonomi islam sangat besar. Disinilah lingkup dimana urgensi ukhuwah islamiah bermula. Dalam sejarah, terutama yang dilakoni oleh para sahabat nabi Muhammad SAW, peran masyarakat sangat dominan dan bahkan bisa menentukan jalannya sebuah peperangan. Berikut dibawah ini usaha-usaha yang dapat di lakukan oleh masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan:

a) Memenuhi kebutuhan keluarga

Islam telah menjadikan antara anggota keluarga saling menjamin dan mencukupi. Sebagian meringankan penderitaan anggota yang lain. Yang kuat membantu yang lemah. Yang kaya yang mencukupi yang miskin. Yang mampu memperkuat yang tidak mampu. Hubungan persaudaraan islam, faktor kasih sayang, cinta mencintai, dan saling membantu adalah ikatan yang kokoh, karna mereka merupakan satu keluarga dan kerabat yang lebih berhak di utamakan. Anggota keluarga terhadap keluarganya mempunyai hak dan kewajiban yang lebih banyak dari pada terhadap orang lain, karna adanya ikatan nasab dan keluarga. Kewajiban tersebut berarti pemberian bantuan dan nafkah kepada keluarga yang tidak mampu. Bahkan dalam islam sedekah yang paling utama adalah kepada keluarga, saudara, dan sanak famili yang terdekat. Sebagai mana sabda nabi saw : “ sedekah kepada orang miskin adalah satu sedekah dan sedekah kepada kerabat mendapat dua:

sedekah dan menyambung kekerabatan.” (HR.tirmidzi, naza’i Ibnu maja, dan Darimi).

b) Menunaikan zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan merupakan komponen utama konsep pengentasan kemiskinan dalam ekonomi Islam. Zakat sifatnya wajib di bebaskan kepada orang-orang miskin yang mampu. Golongan fakir dan miskin diutamakan dalam penyaluran zakat dibanding golongan-golongan yang lainnya. Zakat bisa dikatakan sebagai pengaturan sistematis yang melandasi jaminan sosial. Ia tidak hanya mengandalkan pada sumbangan sukarela individu, tapi dilaksanakan melalui koordinasi pemerintah secara terencana dan teratur. Sebuah kerjasama yang tujuan akhirnya adalah menjamin kebutuhan semua orang yang memerlukan bantuan. kebutuhan tersebut menyangkut kebutuhan pangan, sandang, papan, dan semua jenis kebutuhan hidup lainnya. Baik kebutuhan itu menyangkut pribadi atau orang yang dalam tanggung jawabnya (keluarga). Pemberian zakat tidak hanya terbatas pada masyarakat muslim, tetapi juga mencakup semua anggota masyarakat yang hidup di bawah naungan negara, baik mereka yahudi atau Kristen.

c) Menunaikan kewajiban selain zakat

Selain zakat ada hal-hal yang wajib dipenuhi oleh seorang muslim, karena berbagai sebab dan hubungan. Kesemuanya itu merupakan sumber dana bantuan bagi orang-orang fakir dan miskin dan merupakan sumber kekuatan untuk mengentaskan kemiskinan. Diantaranya adalah: hak bertetangga; qurban hari raya haji (Iduladha); kaffarat sumpah; kaffarat dzihar; kaffarat karena bersetubuh disiang hari bulan ramadhan; fidiah orang yang lanjut usia dan wanita hamil serta menyusui yang

tidak sanggup berpuasa ramadhan; kewajiban membagikan tanaman pada saat panen; kewajiban mencukupi fakir miskin; kewajiban mencukupi fakir miskin merupakan kewajiban yang paling utama, nabi Muhammad saw, bersabda:

Orang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Karena itu janganlah berlaku dzalim kepadanya dan jangan membiarkan terlantar” (HR. Bukhari dan Muslim).²³

Yang dimaksud “jangan membiarkan ia terlantar” ialah jangan bersikap dingin dan acuh tak acuh terhadap derita, kesulitan, dan bahaya yang sedang mengancam seseorang muslim tanpa melakukan usaha dan bantuan untuk mengatasinya.

d) Melaksanakan sedekah suka rela

Seorang muslim adalah insan yang suka memberikan lebih dari apa yang diminta, suka mendermakan lebih dari apa yang diminta. Ia suka memberikan sesuatu, kendati tidak diminta. Ia suka bersedekah (memberikan infaq) dikala senang maupun susah, pada waktu siang maupun malam, secara diam-diam (sembunyi-sembunyi) maupun secara terang-terangan. Orang yang berakhlak mulai itu mencintai orang lain, lebih dari dirinya sendiri. Bahkan ia rela mengalahkannya, kendati dirinya dalam keadaan susah (itsar) yang merupakan puncak dari ukhuwah islamiyah. Ini dilakukan karena seorang muslim telah menyadari bahwa harta itu tidak lebih hanya sebagai suatu alat untuk bersedekah dan berbuat baik dengan sesama manusia, bahkan suatu tujuan. Mereka melakukan ini semua semata-mata ikhlas karena Allah dan mengharapkan ridha Allah dan pahalanya. Bukan karena mereka mabuk pujian, atau sanjungan, atau kepopuleran, dan bukan pula karena

²³ Ibnu Hazim, Al-Muhalla bi Al-Atsar li Ibni Hazm, juz VII, hal.471-473

takut, adanya hukuman dari pihak penguasa. Hal ini sangat didorong dalam Islam dengan banyaknya nash-nash yang menganjurkan untuk melakukan hal ini.

e.) Membangun bisnis dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan

Berbisnis merupakan sesuatu yang mubah dan akan menyumbangkan banyak benefit terhadap pengentasan kemiskinan jika dilakukan sesuai dengan koridor syariah. Dalam konteks pengentasan kemiskinan masyarakat yang membangun sebuah bisnis mestilah memperhatikan eksternalitas dari adanya bisnis tersebut terhadap lingkungan sosial dan alam. Ini juga merupakan pengejawantahan *ukhuwah islamiyah*. Bisnis yang bertanggungjawab sosial dan lingkungan selain dapat meningkatkan kualitas hidup individu-individu yang dipekerjakan secara jasmani dan rohani juga menjaga kelestarian SDA dengan tidak melakukan eksploitasi dan tetap menjaga keberlanjutannya.

f.) Menunaikan wakaf

Wakaf merupakan amal jariyah dan bentuk sedekah yang spesifik. Jika sedekah biasa semisal memberi makan orang miskin maka ketika makanan itu telah habis, maka habis juga manfaat dari sedekah tersebut. Sedangkan wakaf, akan terus langgeng terus menerus sepanjang masa selama sesuatu yang diwakafkan tersebut (tanah, perkebunan, Al-Qur'an) ada.²⁴

C. Kerangka Konseptual

Tinjauan ini menguraikan secara konseptual pengertian-pengertian secara umum pada objek-objek penelitian yang berjudul “Penanggulangan Kemiskinan: Antara Pemerintah dan Pernerdayaan Masyarakat di Kecamatan Bacukiki (Perspektif

²⁴Muhammad Iqbal, “konsep pengentasan kemiskinan dalam ekonomi islam”, *junal ilmiah*, 2017, h.25.

Ekonomi Islam). Untuk memenuhi lebih jelas tentang penelitian ini maka dipandang perlu menguraikan pengertian objek-objek penelitian dalam judul sehingga tidak menimbulkan pengertian dan penafsiran berbeda. Pengertian ini dimaksudkan agar terwujudnya persamaan persepsi sebagai landasan pokok pembahasan masalah selanjutnya.

1. Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Proppenas di tempuh melalui dua strategi utama. Pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara. Kedua, membantu masyarakat yang mengalami kemiskinn kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan. Strategi tersebut selanjutnya di tuangkan dalam tiga program yang langsung diarahkan pada penduduk miskin yaitu: penyediaan kebutuhan pokok, pengembangan sistem jaminan sosial, pengembangan budaya usaha masyarakat miskin.

Penanggulangan kemiskinan yang dimaksud disini adalah Penanggulangan Kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Parepare yang disalurkan melalui Kelurahan yaitu Kelurahan Lompo'e Kecamatan Bacukiki Kota Parepare.

2. Pemerintah

Pemerintah atau *Government* dalam bahasa Indonesia berarti pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya. Bisa juga berarti lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, atau kota, dan sebagainya .

Menurut M.kusnardi pemerintah diartikan sebagai urusan-urusan yang dilakukan oleh sebuah negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat ataupun warga

yang dimilikinya dengan jalan memenuhi kepentingan rakyatnya serta menjalankan dan melaksanakan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif secara baik dan benar. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan Pemerintah adalah Pemerintah Daerah kota Parepare.

3. Masyarakat

Masyarakat dalam KBBI berarti sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

Menurut Maclver, pengertian masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok, berbagai golongan dan pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan individu (manusia). Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan masyarakat adalah masyarakat Kecamatan Bacukiki Kota Parepare.

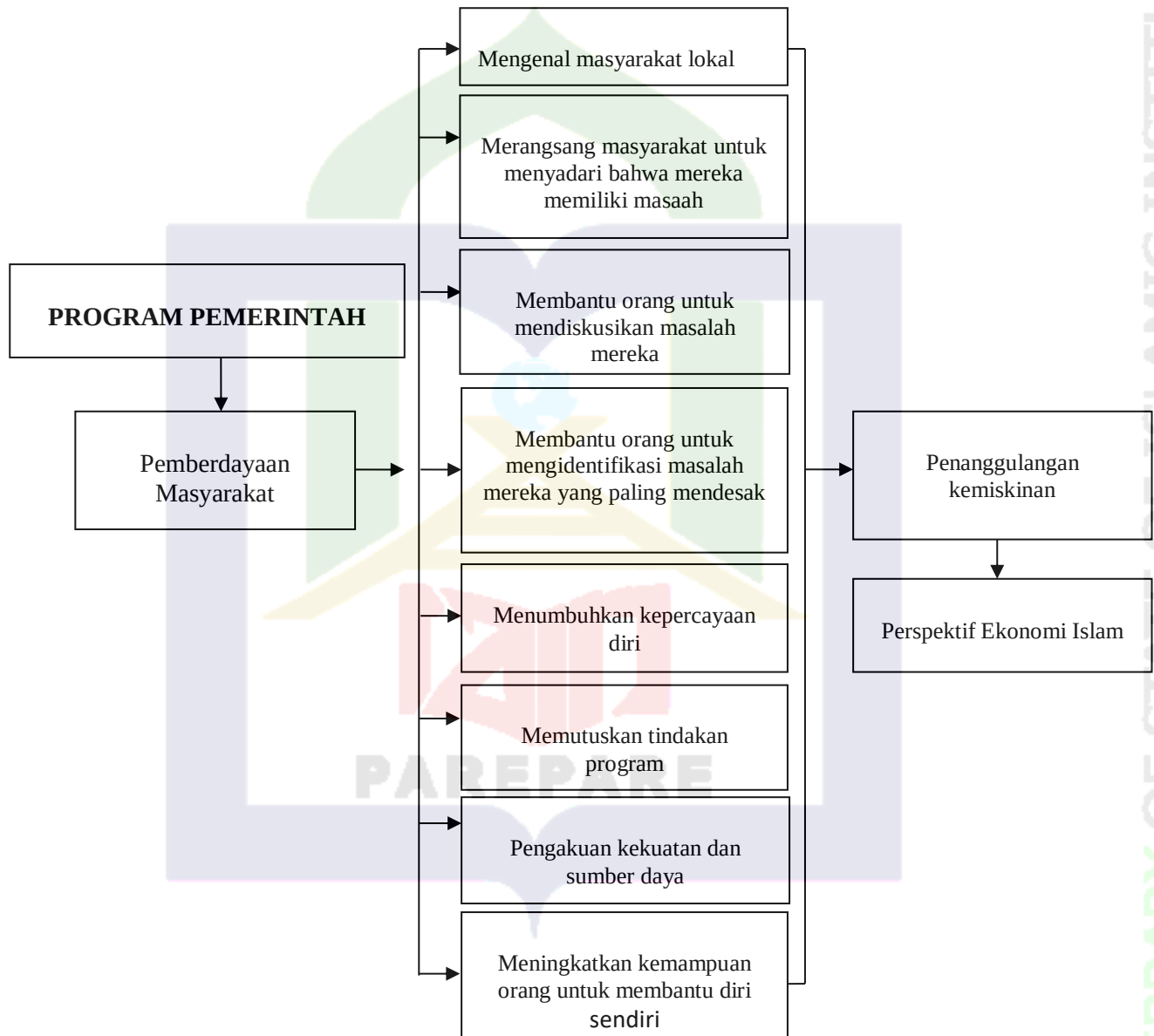
4. Perspektif Ekonomi Islam

Perspektif dalam konteks sistem dan persepsi visual adalah cara bagaimana objek terlihat pada mata manusia berdasarkan sifat spasial, atau dimensinya dan posisi mata relatif terhadap objek.

Ekonomi Islam atau Ekonomi berbasis Syariah adalah sebuah sistem ekonomi yang memiliki tujuan utama kesejahteraan umat. Sistem ekonomi syariah berpedoman penuh pada Al-Qur'an dan As-sunnah. Ekonomis Islam yang dimaksud pada penelitian ini mengacu pada teori Yusuf Qardhawi yang menggagas konsep pengentasan kemiskinan yang bertumpu pada instrumen: bekerja, jaminan dari family dekat yang mampu, zakat, jaminan negara dari berbagai sumbernya, hak-hak selain zakat, derma suka rela/ Filan tropi.

D. Kerangka pikir

Untuk memperjelas gambaran dari penelitian ini, berikut ini peneliti menyajikan kerangka pemikiran yang dapat mewakili dari isi penelitian ini secara umum dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan metode deskriptif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan apa yang diteliti melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.²⁵

Dengan melakukan pendekatan deskriptif kualitatif, yakni meneliti peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan sebagaimana adanya. Namun tidak bisa terlepas juga dari penelitian kepustakaan (*library research*) karena dapat menjadi rujukan untuk mencari literatur-literatur dalam mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada penelitian ini terletak di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan selama 1 bulan dan jika memungkinkan waktunya akan ditambah sampai terhimpun data secara akurat.

3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih sumber data yang baik lagi relevan, pembatasan

²⁵ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Cet. VII; Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 26.

pada penelitian kualitatif didasarkan pada tingkat kepentingan dari masalah yang dihadapi dalam hal ini “Penanggulangan Kemiskinan: Antara Pemerintah dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare (Perspektif Ekonomi Islam)”. fokus penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare.

C. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.²⁶ Data sebagai suatu hasil dari penelitian berupa fakta atau keterangan yang dapat dijadikan suatu informasi memiliki peranan penting dalam suatu penelitian. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu buku, majalah, jurnal, laporan, atau publikasi dari hasil wawancara.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli/wawancara dengan cara melakukan dialog maupun pertanyaan-pertanyaan untuk mendukung keakuratan data. Sumber data penelitian ini 16 orang yang terdiri dari 4 staff kecamatan dan kelurahan Lompoe, 1 orang dari BAZNAS dan 11 masyarakat Kelurahan Lompoe Kecamatan Bacukiki Kota Parepare penerima bantuan.

²⁶ Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktik)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 87.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung serta melalui media perantara. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku literatur, laporan jurnal, situs internet dan dokumen di instansi pemerintah (kelurahan dan kecamatan).

D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data-data yang terkait sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan yakni langsung dari lokasi penelitian (*Field Research*) agar memperoleh data-data yang akurat dan kredibel terkait dengan objek penelitian, yakni sebagai berikut:

1. Pengamatan (Observasi)

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. Observasi merupakan pengamatan dimana peneliti mengamati langsung terhadap gejala-gejala obyek yang diselidiki baik pengamatan itu dilaksanakan dalam situasi sebenarnya maupun dalam situasi yang diadakan. Observasi sangat perlu guna mendeskripsikan realita penerapan program pemberdayaan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan.

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara dapat didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan dengan seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang memberi informasi yang mengetahui persis data yang mau diteliti.²⁷

²⁷ Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 50.

Pemahaman tersebut diatas memberikan gambaran bahwa teknik wawancara merupakan salah satu cara untuk mendapatkan informasi antara narasumber dan peneliti, data dalam penelitian ini, merupakan salah satu elemen penting dalam proses penelitian. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pedoman wawancara.

Pedoman wawancara adalah instrumen yang digunakan untuk memandu jalannya wawancara. Pedoman wawancara tersebut digunakan oleh pewawancara sebagai alur yang harus diikuti, mulai dari awal hingga akhir wawancara. Pedoman wawancara berfungsi membimbing alur wawancara terutama mengarah tentang hal-hal yang harus ditanyakan. Dengan pedoman wawancara dapat dihindari kemungkinan melupakan beberapa persoalan yang relevan dengan permasalahan penelitian.²⁸

Interview merupakan alat pengumpul informasi dengan cara tanya jawab. Ciri utama dari interview adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah tidak terstruktur (non-directif).

Dalam wawancara tidak terstruktur, tidak ada pertanyaan yang ditentukan sebelumnya, kecuali pada tahapan sangat awal, yakni ketika peneliti memulai wawancara dengan melontarkan pertanyaan umum dalam area studi. Sebuah agenda atau daftar topik dapat membantu untuk tetap fokus selama jalannya wawancara.²⁹

²⁸ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Edisi Kedua* (Kencana), h. 137.

²⁹ Christine Daymon dan Immy Holloway, *Metode-Metode Riset Kualitatif dalam Public Relations dan Marketing Communications* (Jakarta: Bentang Pustaka, 2007), h. 264.

Wawancara dalam penelitian ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan untuk mengetahui hal-hal dari informasi yang lebih mendalam. Adapun informan dalam penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Bacukiki Kelurahan Lompoe Kota Parepare yang terdiri dari staff Kecamatan dan Kelurahan Lompoe dan masyarakat penerima bantuan serta staff BAZNAS Parepare.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah alat pengumpulan data dengan cara menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.³⁰ Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen yang berfungsi sebagai data pendukung dan data pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam.³¹

E. Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian untuk menguji keabsahan data guna mengatur validitas hasil penelitian ini dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai macam teknik pengumpulan data dan asal atau sumber data yang telah ada.³² Untuk itu peneliti dapat melakukan dengan jalan mengajukan berbagai macam pertanyaan, melakukan pengecekan dengan berbagai sumber, serta memanfaatkan berbagai cara agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.

³⁰ Esti Ismayanti, *Metode Penelitian Bahasa dan Sastra* (Cet. IV; Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), h.81-82

³¹ Basrowi dan Suwardi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.158.

³² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif di Lengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2005), h.94

F. Teknik Analisis Data

Dalam mengelola data, penulis menggunakan metode kualitatif dengan melihat aspek-aspek objek penelitian. Data yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data kemudian dianalisis, yakni dengan mendiskripsikan dalam pemahaman data. Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak berada dalam lokasi penelitian. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan dalam analisis penulisan.³³

Pada penelitian ini menggunakan analisa deduktif, artinya data yang diperoleh dan dihasilkan di lapangan secara umum disimpulkan pada akhir penulisan. Menurut Miles dan Huberman, ada tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, model data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian, dan pentransformasian data kasar dari lapangan.³⁴ Dalam proses reduksi ini, peneliti benar-benar mencari data yang benar-benar valid dan akurat. Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Ia merupakan bagian dari analisis, pilihan-pilihan peneliti potongan-potongan data untuk diberi kode, untuk ditarik ke luar, dan rangkuman pola-pola sejumlah potongan, apa pengembangan ceritanya, semua merupakan pilihan-pilihan analitis. Reduksi data adalah suatu

³³Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta Cet. XIX, 2014), h. 194.

³⁴Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 209.

bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasi.

2. Model Data/Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk ditarik pada kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Oleh karena itu, sajiannya harus tertata secara apik.

Pada umumnya teks tersebut berpencar-pencar, bagian demi bagian, tersusun kurang baik. Pada kondisi seperti ini peneliti mudah melakukan suatu kesalahan atau bertindak secara ceroboh dan sangat gegabah mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak berdasar. Kecenderungan kognitifnya adalah menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan dan selektif atau konfigurasi yang mudah dipahami.³⁵

Selanjutnya dapat memberikan gambaran dalam kesimpulan sehingga menggambarkan kesimpulan yang dijustifikasikan dan bergerak ke analisis tahap berikutnya. Sebagaimana dengan reduksi data, menciptakan dan menggunakan model bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Merancang kolom dan baris dari suatu matrik untuk data kualitatif dan menentukan data yang mana, dalam bentuk yang sama, harus dimasukkan ke dalam sel yang mana adalah aktivitas analisis.³⁶

³⁵Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : CV Alfabeta, 2011), h. 101.

³⁶Emzir, *Analisis data : Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 132.

3. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi Kesimpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan “makna” sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proporsi-proporsi, sehingga dapat menarik kesimpulan-kesimpulan secara jelas, memelihara kejujuran dan keakuratan data.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Wujud Penanggulangan Kemiskinan antara pemerintah dan masyarakat di Kecamatan Bacukiki

Persoalan masyarakat dalam perkembangannya sering dikaitkan dengan masalah kemiskinan, Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu untuk memenuhi hak-hak dasarnya dan mengembangkan hidup yang bermartabat. pada umumnya dikatakan bahwa memutuskan mata rantai lingkaran kemiskinan dapat dilakukan dengan berbagai strategi, yaitu meningkatkan keterampilan sumberdaya manusia, penambahan modal investasi dan mengembangkan teknologi melalui berbagai suntikan pendanaan dan bantuan peralatan. Seiring dengan ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dalam penanggulangan kemiskinan.

Wujud penanggulangan kemiskinan dirancang melalui berbagai program kegiatan Pemerintah Daerah. Olehnya itu peranan penting dalam penanggulangan kemiskinan ditentukan dari berbagai program yang kegiatannya tertuang dalam APBD, program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, serta melibatkan masyarakat untuk diberdayakan melalui proses Program perencanaan, olehnya itu diharapkan masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial dan memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri, dalam hal ini Pemberdayaan masyarakat hanya bisa berbuat apabila warganya ikut berpartisipasi.

Program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan selama ini melalui mekanisme terstruktur yaitu diawali dengan usulan warga di setiap kelurahan yang

biasa disebut musyawarah rencana pembangunan tingkat kelurahan, selanjutnya ke musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan, dan seterusnya ketingkat kota. Temuan pada penelitian menunjukkan bahwa pada musyawarah pembangunan di tingkat Kecamatan, usulan masyarakat yang mewakili kelurahan hanya sebagian terakomodir .

Temuan di lapangan tentang pengusulan program dari kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan yaitu program pemerintah yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat yaitu:

a. Perbaikan Rumah

program bantuan perbaikan rumah selanjutnya di pihak ketigakan kepada masyarakat yang memiliki skill tentang perumahan, dari tujuh unit rumah yang di perbaiki pada umumnya atap, dinding, serta lantai (papan) dan yang meluncurkan dana ini bervariasi antara Rp 5000.000 s/d Rp 75.000.000.

Tabel 4.1 Perbaikan rumah warga

No	Jenis Bantuan	Penerima	Jumlah
1.	Bedah rumah	- Halija - I Masse - Hariyati jalil - Ipida - Rahma - Isia - Hasmiah	7 orang

Sumber : Dokumen Kelurahan Lompo'e Tahun 2021

Berdasarkan data di atas bahwasanya perbaikan rumah warga mensasar pada 7 orang warga di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare. Sebagaimana hasil wawancara yang di ungkapkan oleh Bapak Edi Sutrisno selaku staff bagian Pemberdayaan masyarakat menyatakan bahwa:

Masyarakat yang dapat bantuan perbaikan rumah, biasanya dilihat dari kondisi rumah yang di tempati sekarang misalnya atap rumahnya yang bocor, dinding rumah kayunya yang rapuh, dan sudah tidak layak huni. biasanya rumah yang kondisinya tidak memungkinkan akan di rekomendasikan untuk mendapatkan bantuan. Dan sudah ada beberapa warga yang menerima bantuan perbaikan rumah dengan dana yang bervariasi antara Rp 5.000.000 sampai Rp 75.000.000.³⁷

Hal serupa disampaikan oleh ibu Isia, selaku salah satu warga penerima bantuan perbaikan rumah mengatakan bahwa

Alhamdulillah nak, bantuan yang ku dapat itu perbaikan rumah karena rumah yang dulu rapuh semuanya, biasanya mengungsika di rumahnya keluarga karna tidak bisami di tempati. Kalau tidak salah anggarannya itu Rp75.000.000, satu rumahmi itu diperbaiki.³⁸

Adapun hal berbeda yang di sampaikan oleh ibu Hasmiah, yang juga merupakan salah satu warga penerima bantuan rumah mengatakan bahwa

Jadi bantuan perbaikan rumah yang ku dapat itu bantuan seng karna bocor-bocormi seng rumah yang dulu.³⁹ Anggaran perbaikannya itu sekitaran Rp 8.000.000 kalau tidak salahka nak.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka diketahui bahwa masyarakat yang mendapatkan bantuan terlebih dahulu dilihat dari kondisi rumah sebelumnya, selanjutnya apabila tidak memungkinkan maka akan direkomendasikan untuk mendapatkan bantuan perbaikan rumah. Adapun perbaikan rumah yang dilakukan meliputi perbaikan atap rumah, dinding, dan rumah utuh. Adapun kisaran yang diberikan untuk perbaikan rumah yaitu Rp 5.000.000 sampai dengan Rp 75.000.000.

Berdasarkan pernyataan di atas maka dapat peneliti simpulkan bahwa warga yang mendapatkan perbaikan rumah sangat bervariasi mulai dari perbaikan atap rumah, dinding, dan ada yang mendapatkan perbaikan rumah secara menyeluruh. Anggaran yang di butuhkan untuk setiap perbaikan atap rumah kurang lebih Rp 8.000.000 tergantung kerusakan rumah. adapun untuk perbaikan rumah secara menyeluruh dibutuhkan anggaran kurang lebih Rp 75.000.000

³⁷Edi Sutrisno, Staff Pemberdayaan Masyarakat, *Wawancara* dilakukan di Kantor Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, 7 November 2021

³⁸Isia, penerima bantuan perbaikan Rumah, *Wawancara* dilakukan di Kelurahan Lompo'e, Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, 5 November 2021

³⁹Hasmia, penerima bantuan perbaikan Rumah, *Wawancara* dilakukan di Kelurahan Lompo'e, Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, 5 November 2021

b. Pemberian bantuan mesin jahit

Bantuan alat usaha mesin jahit diberikan ke beberapa masyarakat yang bergerak di bidang menjahit, alat yang diberikan berupa mesin jahit dan alat untuk mengobras. Bantuan tersebut diberikan agar berguna untuk masyarakat yang menerimanya sehingga dari bantuan tersebut masyarakat bisa memanfaatkannya . Adapun nama-nama penerima alat bantuan tersebut seperti pada tabel dibawah ini

Tabel 4.2 pemberian mesin usaha menjahit

No	Jenis Bantuan	Penerima	Jumlah
1.	Mesin jahit	- Rahmayanti - Sania - Iranru - Isa - Nadira - I Menneng - Ayu olivia - Nurlaelani - Nadira - Sukwati - Nurma - Sania - Qamariah - Nahira - Dawia - Linda	16 orang

Sumber : Dokumen Kelurahan Lompo'e Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas pemberian mesin usaha menjahit mensasar 16 orang masyarakat Kecamatan Bacukiki Kelurahan Lompo'e Kota Parepare. Sebagaimana hasil wawancara kepada ibu Rosdiana selaku staff Pemberdayaan Masyarakat, mengatakan bahwa

Bantuan alat menjahit yang diberikan biasanya berupa mesin jahit ada juga yang dapat alat obras. untuk pelatihnnya yang menerima bantuan untuk tahun ini tidak ada dilaksanakan, kalau tahun kemarin ada.⁴⁰

Hal serupa disampaikan oleh ibu Iranru, selaku warga penerima alat mesin jahit mengatakan bahwa

Bantuan yang saya terima mesin jahit, bantuan yang dikasi saya gunakan untuk terima pesanan menjahit kalau ada pesanana jahitan dari tetangga,dan Sedikit membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁴¹

Adapun hal berbeda yang dikatakan ibu Isa

Ada bantuan mesin jahit saya dapat kemarin nak, tapi itu bantuan yang dikasi tidak ku tau pake i, tidak ada juga pelatihnnya kemarin. Kalau bantuan yang di kasi tidak adami barangnya sudah saya jual dari pada tinggal saja dirumah jadi kupakai untuk beli kebutuhan yang lain.⁴²

Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat peneliti simpulkan pemerintah dalam hal penanggulangan kemiskinan memberikan bantuan salah satunya mesin jahit untuk warga. Bantuan yang diberikan mulai dari mesin jahit dan alat obras. Beberapa warga yang menerimanya berhasil memanfaatkan bantuan alat tersebut sehingga bisa membantu dirinya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Temuan pada lokasi penelitian sebagian masyarakat yang menerimanya kurang memahami bantuan yang diberikan karna tidak ada pelatihan yang dilakukan sebelumnya, sehingga bantuan yang diberikan tersebut dijual oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan lainnya.

c. Bantuan alat pertukangan

Bantuan yang diberikan mulai dari alat pertukangan kayu juga bantuan alat tukang batu. Bantuan diberikan bermacam-macam adapun nama-nama penerima bantuan peralatan pertukangan dapat dilihat pada tabel berikut.

⁴⁰Rosdiana ,Staff Pemberdayaan Masyarakat, wawancara dilakukan di kantor Kelurahan Lompo'e, 7 November 2021

⁴¹Iranru, penerima bantuan alat mesin jahit, Wawancara dilakukan oleh peneliti di Kelurahan Lompo'e, Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, 5 November 2021

⁴²Sania, penerima bantuan alat mesin jahit, Wawancara dilakukan oleh peneliti di Kelurahan Lompo'e, Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, 5 November 2021

Tabel 4.3 Bantuan alat pertukangan

No	Jenis Bantuan	Penerima	Jumlah
1.	Alat-alat tukang kayu	- Haeruddin - Lahatta - Abi - Andika - Latahang - Ladong - Sutarno - La Naming - Sakka - Anas - Alang - Lahi - Larasi - Kamarudding	14 orang

Sumber : Dokumen Kelurahan Lompo'e 2021

Berdasarkan tabel di atas pemberian bantuan alat pertukangan jumlah penerimanya ada 14 orang di Kecamatan Bacukiki Kelurahan Lompo'e Kota Parepare. Sebagaimana hasil wawancara kepada ibu Hasniah selaku staff Pemberdayaan Masyarakat, mengatakan bahwa

Bantuan alat pertukangan yang diberikan beranekaragam, ada yang mendapat bantuan alat pertukangan kayu, dan ada yang dapat bantuan alat pertukangan batu. Kalau pelatihannya tidak ada, hanya diperagakan cara pakainya.⁴³

Hal serupa disampaikan oleh pak Haeruddin, selaku penerima bantuan alat tukang kayu mengatakan bahwa

Bantuan yang saya dapat kemarin berupa bantuan alat pertukangan kayu, contohnya bor listrik, gerinda, mesin amplas, gergaji, palu-palu . sangat membantu kalau bekerja ada bisa dipakai. kalau pelatihannya tidak ada cuman diperagakan caranya pakainya.⁴⁴

Adapun hal berbeda yang disampaikan oleh Latahang, beliau mengatakan

⁴³Hasniah, Staff Pemberdayaan Masyarakat, wawancara dilakukan di kantor Kelurahan Lompo'e, 7 November 2021

⁴⁴Haeruddin, penerima bantuan alat pertukangan, Wawancara dilakukan di Kelurahan Lompo'e, Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, 5 November 2021

Saya kerjaku masengsong (tebang pohong) nak, tapi bantuan yang saya terima kemarin alat tukang batu kudapat kayak skop, palu-palu, gerobak pasir. Ada saja ji itu alat e dirumah tidak ada pakai karna saya masengsong ji ku tau pakai.⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat peneliti simpulkan bahwa bantuan alat pertukangan yang didapat masyarakat ada yang mendapat bantuan alat pertukangan kayu, juga ada yang mendapatkan bantuan alat pertukangan batu. Dari bantuan yang diberikan masyarakat menggunakan alat yang diberikan tersebut untuk bekerja sehari-hari dan sangat membantunya dalam memenuhi kebutuhannya.

Temuan pada lokasi penelitian bahwa bantuan yang diberikan ke sebagian masyarakat masih ada yang menerima tidak sesuai dengan bidangnya sehingga bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran dan membuat masyarakat menjual alat yang diberikan tersebut untuk memenuhi kebutuhannya.

d. Pemberian alat tata rias rambut / kecantikan / salon

Dalam menanggulangi kemiskinan Pemeritah memberikan berbagai program bantuan usaha kepada masyarakat berupa pemberian alat salon dan alat tata rias. adapun pelatihan yang diberikan mulai dari bimbingan cara memotong rambut dan belajar make-up pengantin untuk berbagai acara. Pelatihan yang diberikan agar masyarakat bisa mengembangkan pengetahuannya sehingga dari bimbingan yang diberikan bisa memperoleh hasil.

Tabel 4.4 Penerima bantuan alat tata rias/ kecantikan/ salon

No	Jenis bantuan	Penerima	Jumlah
1.	Alat-alat salon	-Rasmawati -Baharia -Amyna	3 orang

Sumber : Dokumen Kelurahan Lompo'e Tahun 2021

⁴⁵Latahang, penerima bantuan alat pertukangan, Wawancara dilakukan di Kelurahan Lompo'e, Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, 5 November 2021

Dari data di atas dapat diketahui penerima bantuan tata rias atau alat kecantikan/salon ada 3 orang di Kecamatan Bacukiki, Kelurahan Lompo'e kota Parepare. Adapun wawancara kepada Rasmawati selaku penerima bantuan tersebut mengatakan bahwa

Bantuan yang saya dapat berupa alat gunting rambut, sisir, clipper dan alat tata rias. Tidak mengusulkan jika kemarin langsung ada panggilan dari kelurahan baru dikasika alatnya. Iya memang ada pelatihannya kemarin tapi pelatihan tata riasji yang saya ikuti karna mauka tambah-tambah pengetahuanku dalam merias wajah. Kalau pelatihan yang di ajarkanki seputar tata rias pengantin kebetulan tahun ini mengambil tema pengantin muslim. Alhamdulillah dari pelatihan yang saya ikuti dan selaluka belajar-belajar sampai sekarang bisaka buka jasa make up kalau ada acara. Kalau tarif make-up di saya Rp 70.000/ orang dek.⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa bantuan alat sebelum diberikan dilakukan pelatihan-pelatihan terlebih dahulu untuk melatih skill masyarakat . Adapun bimbingan yang dilakukan mulai dari cara pemotongan rambut sampai dengan belajar merias wajah. Dari pelatihan yang diberikan membuahkan hasil bagi masyarakat karna dari ilmu yang diperoleh pada saat pelatihan merias wajah sehingga masyarakat membuka jasa merias wajah baik untuk acara pesta, wisuda dan acara lainnya. Dalam hal ini bantuan serta pelatihan-pelatihan yang diberikan sangat membantu dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat.

F. Bantuan alat memasak

Bantuan yang diberikan baik perorang maupun berkelompok biasanya terdiri dari tiga sampai tujuh orang, yang berkelompok biasanya menerima untuk pesanan hajatan pengantin. sebelum bantuan diberikan dilakukan pelatihan-pelatihan untuk menambah keterampilan masyarakat .Adapun nama-nama penerima bantuan sebagai berikut.

⁴⁶Rasmawati, penerima bantuan alat tata rias, *Wawancara* dilakukan oleh peneliti di Kelurahan Lompo'e, Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, 5 November 2021

Tabel 4.5 Penerima alat memasak

No	Jenis bantuan	Penerima	Jumlah
1.	Alat memasak	- Surah - Hj.Nori - Fatma - Mba	4 Orang

Sumber :Wawancara Staff Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lompo'e

Dari data di atas dapat diketahui penerimaan alat memasak ada 4 orang di Kecamatan Bacukiki, Kelurahan Lompo'e, Kota Parepare. Adapun wawancara kepada Surah selaku penerima bantuan alat tata boga mengatakan.

“Alat-alat dasarji yang saya kudapat, Kalau pelatihannya kemarin ada”.⁴⁷

Adapun hal serupa disampaikan oleh Hj. Nori selaku penerima bantuan alat memasak mengatakan bahwa

“Kalau saya kemarin dapat seperti mixer, oven, chopper beserta bahan-bahan buat kue. kalau saya tidak sendirika disini tapi kelompok ada 4 orang di dalam kelompok ku kalau turunka maddawa-dawa di pengantin, kalau alat yang saya dapat saya terima kemarin di BLK.”⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa bantuan alat yang diberikan baik dalam bentuk berkelompok, maupun perorangan. Bantuan tersebut diterima di (Balai Latihan Kerja) BLK yang sebelumnya dilakukan pelatihan-pelatihan agar masyarakat dapat menambah keterampilan dan mempraktikkannya untuk mendirikan usaha sehingga dapat memberdayakan dirinya.

B. Faktor yang mempengaruhi Penanggulangan Kemiskinan

Kelompok masyarakat miskin sangat rentan terhadap guncangan baik secara internal maupun secara eksternal, untuk menghindari guncangan-guncangan tersebut

⁴⁷Surah penerima alat bantuan memasak, wawancara dilakukan di Kelurahan Lompo'e, Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, Tanggal 5 November 2021

⁴⁸Hj. Nori, penerima alat bantuan memasak, wawancara dilakukan di Kelurahan Lompo'e, Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, Tanggal 5 November 2021

dibutuhkan berbagai kebijakan dan kegiatan program yang diperlukan untuk mengurangi resiko penanggulangan kemiskinan, serta meningkatkan kemampuan kelompok miskin, dan menciptakan sistem perlindungan sosial yang efektif. Kemiskinan sering diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Karena itu, rantai pewarisan kemiskinan harus diputus, melalui peningkatan pendidikan serta membuka lapangan pekerjaan. pada persoalan kemiskinan, jika penerapan program dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran dapat memacu inisiatif dan kreativitas mereka yang dapat menjadi modal yang berharga untuk keluar dari lilitan kemiskinan.

Inisiatif dan kreatifitas kriteria masyarakat miskin dipadukan dengan program pemberdayaan masyarakat pada kegiatan penanggulangan kemiskinan diperlukan data yang sangat akurat dan memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penentuan masyarakat yang betul-betul berada di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan disebabkan oleh dua faktor, yaitu:

1. Faktor Internal

Secara internal tingkat kemiskinan masyarakat dipandang perlu di intensifkan diberikan pelatihan yang berkaitan dengan bantuan yang diberikan agar mereka terlepas dari atau di angkat dari tingkat kemiskinan menuju prasejahtera, menanggapi hal ini maka peneliti mempertanyakan kepada Lahatta selaku penerima bantuan alat pertukangan tentang apakah peralatan bantuan sebelum diberikan terlebih dahulu ada pelatihannya beliau menjawab bahwa

Kalau pelatihannya tidak ada, hanya sebelum diserahkan ini bantuannya diperlihatkan dulu dan dijelaskanmi cara pemakaiannya, diperagakan sesuai dengan bentuk bantuan yang diberikan. Misalnya alat pertukangan elektronik seperti kattang, bor dan yang lainnya seperti palu-palu, skop, gerobak pasir serta

pada umumnya dipakai sudah tidak diperagakan lagi. Karena pada umumnya masyarakat sudah tau cara pemakaiannya.⁴⁹

Hal lain disampaikan Hj. Hasnah Daud, selaku penerima alat bantuan menjahit, dan alat tata rias mengatakan bahwa

Saya mengikuti dua program pelatihan kemarin yaitu pelatihan menjahit dan pelatihan tata rias di BLK, untuk tahun 2021 saya hanya mengikuti 1 kali pelatihan.⁵⁰

Hal berbeda disampaikan oleh Surah selaku penerima bantuan alat memasak, mengatakan bahwa

Kalau saya dapat alat masak seperti panci, baki, saji besi. kalau pelatihannya ada dan dilaksanakan kemarin di Baruga Lompo'e tanggal 25 Desember 2021, kalau alatnya dikasikan tanggal 11 Januari 2022 di BLK, kalau nama pengelompokannya tidak ada. yang di ajarkanki banyak di dalam dari buat kue, makanan gorengan, nasi bakar, dll.⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka untuk membebaskan masyarakat dari lilitan kemiskinan berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah mulai dari pemberian berbagai jenis bantuan dan pelatihan-pelatihan guna melatih kemampuan yang dimiliki masyarakat sehingga bisa memberdayakan dirinya dari bantuan yang diberikan adapun bentuk pelatihan yang diberikan mulai dari pelatihan tata rias/salon, pelatihan menjahit dan memasak. Pelatihan dilakukan agar bantuan yang diberikan bisa tepat sasaran.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang datang dari luar diri seseorang, dimana faktor ini melahirkan suatu pembinaan dari berbagai sumber yang dilakukan oleh masyarakat yang awalnya sudah memperoleh bantuan dari pemerintah. Mereka melakukan pembinaan kepada masyarakat yang membutuhkan pelatihan untuk

⁴⁹Lahatta, penerima alat pertukangan, wawancara dilakukan di Kelurahan Lompo'e, Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, Tanggal 5 November 2021

⁵⁰Hj Hasnah Daud, pembina pelatihan menjahit dan tata rias masyarakat Kelurahan Lompo'e, wawancara dilakukan di Kelurahan Lompo'e, Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, Tanggal 5 November 2021

⁵¹Surah, penerima alat bantuan memasak, wawancara dilakukan di Kelurahan Lompo'e, Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, Tanggal 5 November 2021

menambah keterampilan sehingga menjadi berdaya dalam menanggulangi kemiskinan sehingga masyarakat menjadi prasejahtera. Dalam hal ini bentuk binaan yang dilakukan dalam bentuk menjahit dan tata rias.

Menjahit merupakan suatu kemampuan seseorang untuk menyambung kain atau memodifikasi kain agar sesuai dengan yang di inginkan. Bentuk binaan yang dilakukan dengan memfasilitasi warga binaan dalam mengembangkan minat dan kemampuan warga binaan dalam bidang menjahit dan tata rias. Hal ini dapat dijadikan bekal hard skills yang dapat di gunakan oleh warga binaan sebagai alternatif untuk menjadi jalan keluar dari ketidak berdayaan masyarakat.

Hasil wawancara kepada Hj. Hasnah. Daud selaku pembina pelatihan Menjahit dan tata rias Kelompok menjahit mandiri mengatakan bahwa

Saya membuka kursus gratis kepada masyarakat yang ingin mengembangkan kemampuannya di bidang menjahit, dan tata rias. Dana untuk pelatihan ini dari APBD. Untuk alat yang saya gunakan untuk pelatihan difasilitasi oleh Dinas Ketenagakerjaan berupa mesin jahit dan tata rias.⁵²

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka diketahui bantuan yang di dapatkan dipergunakan untuk membuka kursus secara gratis untuk masyarakat- masyarakat yang ingin mengembangkan pengetahuan yang dimilikinya , bantuan kursus pelatihan tersebut gratis dari APBD. Mulai dari bantuan pelatihan menjahit dan bantuan pelatihan tata rias. Program Bantuan Pemerintah Biro Keuangan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Yayasan LPK Buana Mandiri yang berlokasi di BTN Timurama kelurahan Lompo'e.

Pelatihan menjahit dan tata rias dilaksanakan oleh H. Hasnah Daud selaku pembina pelatihan menjahit yang awalnya diberikan bantuan mesin jahit dan alat tata rias oleh dinas ketenagakerjaan. Kemudian dia melaksanakan pelatihan kepada masyarakat yang ingin mengembangkan *skill* dalam menjahit dan tata rias. Adapun jumlah masyarakat binaan menjahitnya yaitu mulai dari 15 sampai 20 orang dan

⁵²Hj Hasnah Daud, pembina pelatihan menjahit dan tata rias masyarakat Kelurahan Lompo'e, wawancara dilakukan di Kelurahan Lompo'e, Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, Tanggal 5 November 2021

jumlah masyarakat binaan untuk tata rias mulai dari 15 sampai 18 orang tergantung dari dana yang tersedia di APBD.

C. Implementasi peran pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan

Memahami persoalan kemiskinan pemerintah dan masyarakat bersatupadu melaksanakan program pengentasan kemiskinan, Peran ini dapat dilihat dari sikap pemerintah yang menyelesaikannya sebagai pengatur kebijakan perencanaan pembangunan, kesemuanya ini bukan saja karna peran pemerintah akan tetapi dipandang perlu melibatkan berbagai elemen masyarakat agar konsep-konsep perencanaan program tepat sasaran.

Untuk mengetahui lebih jauh wujud bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin maka wawancara selanjutnya kepada pak Haeruddin penerima bantuan alat pertukangan mempertanyakan bagaimana prosedurnya sehingga mendapat bantuan serta apa saja persyaratannya, beliau menjawab bahwa

Pada saat pendataan yang diutamakan ktp, kk,domisili, serta jenis usaha. Dan sebelum mendapat bantuan terlebih dahulu kita mengikuti sosialisasi pemanfaatan alat-alat serta tehnik mendesain meubel dan hal-hal lainnya.⁵³

Berdasarkan pemapara dari hasil wawancara oleh pak Haeruddin selaku penerima bantuan peralatan pertukangan. Menanggapi hal tersebut dapat disimpulkan bahwa bantuan-bantuan yang diberikan dari pemerintah tidak begitu saja langsung diberikan namun melalui beberapa mekanisme persyaratan yang harus terpenuhi sebelumnya, tentunya hal ini merupakan pengawasan lebih lanjut terhadap penerima bantuan agar apa yang di programkan tepat sasaran.

⁵³Haeruddin, penerima bantuan peralatan, wawancara dilakukan di Kelurahan Lompo'e, Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, Tanggal 5 November 2021

Temuan dilapangan menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan melalui kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah dengan Yayasan LPK Buana Mandiri yang didalamnya terdiri dari Kelompok Jahit Mandiri dan Kelompok Yani Kecantikan.

Hasil wawancara kepada Pak Haeruddin pelaku ekonomi rakyat yang mempertanyakan tentang seberapa besar bantuan ini dapat meningkatkan taraf hidup dan peningkatan pendapatan, beliau menjawab bahwa :

Saya bergerak di bidang peralatan rumah tangga, yang biasa disebut dengan meubel, dengan peralatan bantuan hasilnya sangat memuaskan dan memberikan dampak yang mempengaruhi permintaan barang yang sebelumnya jangka waktu satu sampai dua bulan baru terjual, sekarang bisa dua terjual dalam 1 bulan.⁵⁴

Berdasarkan pemaparan oleh pak Haeruddin, selaku masyarakat penerima bantuan peralatan dapat disimpulkan bahwa Bantuan pemerintah kepada masyarakat miskin yang betul-betul tepat sasaran menunjukkan bahwa ada tren peningkatan pendapatan masyarakat disisi lain pola berfikir yang bersifat tradisional dengan peralatan yang moderen desain meubel sangat menarik, tentunya berpengaruh besar terhadap peningkatan pendapatan dari penjualannya.

Keberhasilan ini menunjukkan bahwa berkat program pemerintah melalui pemberdayaan masyarakat dan kelurahan hasilnya sudah dapat dilihat, namun ada beberapa hal yang belum berhasil akan tetap menjadi perhatian pemerintah karena dana untuk pengentasan kemiskinan tiap tahunnya di anggarkan, keberhasilan ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah mampu diberdayakan melalui pemberdayaan masyarakat.

⁵⁴Haeruddin, penerima bantuan peralatan, wawancara dilakukan oleh peneliti di Kelurahan Lompo'e, Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, Tanggal 5 November 2021

Mencermati beberapa hal, baik pada wawancara maupun pada pendistribusian bantuan kepada masyarakat miskin serta implementasinya maka dipandang perlu memahami beberapa pendekatan tentang penanggulangan kemiskinan menuju masyarakat sejahtera, antara lain:

1. Mengenal masyarakat lokal

Data yang dibutuhkan diawali dengan mengetahui karakteristik masyarakat setempat (lokal) yang akan diberdayakan, termasuk perbedaan karakteristik yang membedakan masyarakat Kecamatan yang satu dengan yang lainnya. Mengetahui artinya dalam memberdayakan masyarakat di pandang perlu mengetahui karakteristik masyarakat dalam hal ini data penduduk apakah masyarakat pendatang atau masyarakat imigran, temuan pada penelitian terdapat berbagai kriteria masyarakat yang tinggal di beberapa kelurahan yaitu masyarakat pendatang yang kontrak rumah sebagai tempat sementara, serta keliling menjajakan dagangannya. hal ini jika petugas tidak cermat mendata maka terdaftarlah mereka sebagai masyarakat miskin. Untuk menghindari resiko pelaksanaan program pengentasan maka masyarakat demikian tidak dikategorikan masyarakat miskin setempat, Namun di kategorikan masyarakat pendatang yang sifatnya temporer. Hal ini disampaikan oleh staff Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lompo'e ibu Rosdiana yang mengatakan bahwa

Kalau data yang terkumpul dari hasil pendataan RT di lapangan bahwa rata-rata orang yang menjadi warga di kelurahan rata-rata pendatang dan memutuskan untuk menetap dan ada juga warga lokal yang telah lama tinggal di wilayah tersebut.⁵⁵

Adapun jika ingin mengetahui tentang warga yang termasuk dalam kategori kurang mampu dan membutuhkan bantuan dari pemerintah maka dilakukan

⁵⁵Rosdiana, Staff Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lompo'e, wawancara dilakukan di Kelurahan Lompo'e, Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, Tanggal 5 November 2021

pendataan oleh Ketua RT di setiap kelurahan, kemudian data yang terkumpul akan diberikan kepada Ketua RW dan di diteruskan kepada Kelurahan yang menaunginya. Hal ini sebagai mana yang disampaikan oleh Hasniah selaku staff Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lompo'e bahwa

Data warga yang termasuk miskin dan butuh bantuan biasanya dilakukan oleh Ketua RT terlebih dahulu dengan meminta kartu keluarga setiap kepala keluarga yang memenuhi kriteria mendapat bantuan dan tergolong kurang mampu. Kemudian data tersebut biasanya diberikan kepada Ketua RT kemudian diteruskan ke kelurahan, selanjutnya di bawa ke kantor Kecamatan.⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa mekanisme pendataan terlebih dahulu mendata warga tetap dan pendatang yang tinggal di Kelurahan Lompo'e sebelum mendata masyarakat kurang mampu yang membutuhkan bantuan.

Berdasarkan hasil di atas maka dapat peneliti simpulkan bahwa mengenal masyarakat lokal sangat penting sebelum melakukan pendataan untuk dimasukkan ke dalam kategori masyarakat kurang mampu dan membutuhkan bantuan. setelah mengetahui warga setempat yang kurang mampu maka Ketua RT akan mengumpulkan kartu keluarga calon penerima bantuan dan diserahkan ke Ketua RW kemudian diteruskan kepada Kelurahan untuk di tindak lanjuti.

2. Membantu orang untuk mengidentifikasi masalah mereka yang paling mendesak

Masyarakat perlu diberdayakan agar mampu mengidentifikasi permasalahan yang paling menekan. Masalah yang paling menekan inilah yang harus diutamakan pemecahannya. adapun wawancara yang dilakukan oleh Edi Sutrisno Arief selaku staff pemberdayaan masyarakat dalam wawancaranya yang mengatakan bahwa:

Usulan perencanaan pembangunan berdasarkan skala prioritas maksudnya hanya usulan program yang mendesak masuk pada usulan program kecamatan ke tingkat kota karena, anggaran APBD terbatas.⁵⁷

⁵⁶Hasniah, Staff Kelurahan Lompo'e, wawancara dilakukan di Kelurahan Lompo'e, Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, Tanggal 5 November 2021

⁵⁷Edi Sutrisno Arief, Seksi pembangunan, wawancara di Kantor Kecamatan Bacukiki 7 November 2021

Hal serupa pula disampaikan oleh Ibu Masdawati, beliau mengatakan bahwa

Usulan penanggulangan kemiskinan pada umumnya setiap kelurahan mengusulkan yang sejenis, nah olehnya itu diadakan penelitian lebih lanjut kelurahan mana yang paling mendesak dan selanjutnya program kelurahan yang tertunda di prioritaskan untuk tahun berikutnya.⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka diketahui usulan perencanaan di prioritaskan kepada hal-hal yang paling mendesak karena anggaran yang dikeluarkan sangat terbatas sehingga mengurangi jumlah penerima bantuan. Namun yang belum mendapat bantuan akan diprioritaskan lebih dahulu di tahun berikutnya. Sehingga bantuan tersebut merata didapatkan oleh masyarakat kurang mampu.

Berdasarkan hasil di atas maka dapat peneliti simpulkan bahwa wujud kepedulian pemerintah daerah tentang penanggulangan kemiskinan masih sangat peduli walaupun terkadang ada program yang tertunda karena keterbatasan anggaran yang dimiliki namun pada program tahun selanjutnya akan diprioritaskan. Sehingga bantuan yang tersalurkan akan tepat sasaran dan merata kepada setiap masyarakat yang kurang mampu dan sangat butuh untuk di bantu.

3. Memutuskan tindakan program

Masyarakat perlu diberdayakan untuk menetapkan suatu program yang akan dilakukan. temuan dilapangan dalam kegiatan perekonomian masyarakat sangat bervariasi mulai dari orang yang mendapatkan bantuan peralatan pertukangan, bantuan alat mesin jahit, bedah rumah, dan bantuan zakat.

Adapun menurut gagasan Qardhawi tentang konsep pengentasan kemiskinan yang bertumpu pada beberapa hal yaitu bekerja, zakat, jaminan negara dari berbagai sumber. Dilakukan dengan adanya pendataan untuk orang-orang yang dapat memperolehnya guna membuat pemberdayaan masyarakat. Adapun hal tersebut:

⁵⁸ Masdawati, Staff Pemberdayaan Masyarakat, wawancara di kantor Kecamatan Bacukiki 7 November 2021

a. Bekerja

Bekerja adalah hal yang paling penting bagi kehidupan setiap individu untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya seperti untuk mendapatkan sandang, papan dan pangan. Karena setiap orang yang bekerja maka dapat dikatakan dia telah berdaya namun bagi sebagian orang hal tersebut itu tidak didapatkan karena beberapa hal yang membuatnya tidak bisa berdaya. Namun pemerintah memberi bantuan kepada orang-orang yang ingin menambah *skill* mereka untuk berdaya. Seperti halnya ibu Iranru mengatakan bahwa

Saya bergerak dibidang usaha menjahit, beberapa bulan kemarin usaha jahitanku kandas karna beberapa alatku juga tidak lengkap, kalau sekarang Alhamdulillah adami bantuan alat yang saya butuhkan. Itumi bantuan yang dikasi saya pakai kalau ada yang mau dijahitkan pakaiannya, dan dari itu bantuannya ada sedikit upah yang saya dapatkan dan bisa memenuhi kebutuhan hidup sedikit-sedikit.⁵⁹

Selanjutnya wawancara kepada Rasmawati selaku penerima bantuan alat

Alhamdulillah kemarin saya mengikuti pelatihan tata rias, dan dari ilmu-ilmu yang saya dapatkan hingga saya bisa membuka jasa make-up keliling untuk acara pengantin, wisuda dan acara lainnya. sangat membantu dalam sehari-harinya.⁶⁰

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian dari masyarakat disana dalam memenuhi kebutuhannya yaitu bekerja, adapun bantuan yang di berikan berbagai macam seperti alat pertukangan, alat salon, alat menjahit, dan bantuan peralatan lainnya. Dari bantuan yang di berikan sangat bermanfaat karna masyarakat bisa memberdayakan dirinya dari bantuan yang diberikan dengan memanfaatkan bantuan tersebut hingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

b. Zakat

Zakat merupakan hal yang sangat membantu dalam menanggulangi kemiskinan ditengah-tengah masyarakat dan salah satu rukun islam yang merupakan komponen utama konsep pengentasan kemiskinan dalam ekonomi islam. zakat sifatnya wajib di bebaskan kepada orang-orang miskin yang mampu. Golongan fakir dan miskin

⁵⁹Iranru, penerima bantuan peralatan, wawancara dilakukan di Kelurahan Lompo'e, Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, Tanggal 5 November 2021

⁶⁰Rasmawati, penerima bantuan peralatan, wawancara dilakukan di Kelurahan Lompo'e, Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, Tanggal 5 November 2021

diutamakan dalam penyaluran zakat di bandingkan golongan-golongan yang lainnya. Zakat bisa dikatakan pengatur sistematis yang melandasi jaminan sosial.

Seperti halnya yang di katakan oleh Ibu Suarni sebagai wakil ketua 3 bagian perencanaan baznas Kota Parepare mengatakan bahwa

Ada beberapa orang di kelurahan Lompo'e yang mendapat bantuan zakat, bantuan yang diberikan berupa uang senilai Rp 350.000/ org yaitu Rp 200. 000 berupa uang dan Rp 150.000 untuk konsumtif. Bantuan zakat ini diberikan 1 kali dalam setahun dan itupun pemberiannya diberikan pada bulan puasa.⁶¹

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa bantuan yang diberikan oleh Baznas belum bisa masuk untuk mengentaskan kemiskinan karna yang diberikan hanya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari itupun masih bersifat sementara, Sehingga masyarakat yang mendapat bantuan masih perlu memenuhi kebutuhannya lagi dengan cara lain.

c. Jaminan negara dari beberapa sumber

Pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan memberikan jaminan agar warganya bisa mensejahterahkan dirinya dengan memanfaatkan bantuan yang diberikan. Bantuan yang diberikan pun bermacam-macam sesuai kebutuhan dan skill yang dimiliki oleh masyarakat yang menerimanya. Sebagian masyarakat yang di beri bantuan memberikan peningkatan pendapatan sehingga masyarakat mampu memberdayakan dirinya melalui bantuan tersebut. Adapun bantuan yang diberikan seperti bedah rumah, dan pemberian alat usaha.

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh ibu Rosdiana selaku Staff Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bacukiki, yang mengatakan bahwa

Upaya pemerintah dalam menekan angka kemiskinan itu dengan memberikan beberapa jenis bantuan seperti ada beberapa warga yang dapat bantuan dalam bentuk barang. Ada juga berupa uang tergantung pendataan yang sampai, pemerintah juga berharap agar apa yang dikasih bisa dimanfaatkan dengan baik.⁶²

⁶¹Suarni, wakil ketua 3 Perencanaan Baznas Kota Parepare, wawancara dilakukan di kantor Baznas , Tanggal 10 November 2021

⁶²Rosdiana, Staff Pemberdayaan Masyarakat, wawancara dilakukan di kelurahan Lompo'e Kecamatan Bacukiki, 7 November 2021

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat di simpulkan bahwa bantuan-bantuan yang diserahkan sebagai upaya yang dilakukan agar masyarakat bisa memberdayakan dirinya dengan memanfaatkan bantuan yang diberikan oleh pemerintah, baik bantuan peralatan usaha maupun bantuan modal usaha. tujuan dilakukannya untuk meminimalisir jumlah angka kemiskinan disana sehingga masyarakat disana bisa meningkatkan perekonomiannya dengan harapan alat yang diberikan tersebut di pergunakan sebaik-bainya.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Penanggulangan Kemiskinan: antara Pemerintah dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare (Perpektif Ekonomi Islam) maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Adapun wujud penanggulangan kemiskinan antara pemerintah dan masyarakat yaitu diantaranya Perbaikan Rumah, pemberian modal usaha, pemberian peralatan menjahit, pemberian alat pertukangan, pemberian alat memasak, dan pemberian alat salon/tata rias.
2. Ada dua faktor yang mempengaruhi penanggulangan kemiskinan, yaitu faktor internal datang dari dalam pemerintahan untuk mengatasi kemiskinan dengan melakukan pelatihan-pelatihan sebelum menerima alat bantuan Sedangkan eksternal dijalankan oleh masyarakat dari luar pemerintahan yang dimana dilaksanakan oleh Yayasan LPK Buana Mandiri untuk melaksanakan pelatihan menjahit dan tata rias .
3. Implementasi peran pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan di Kelurahan Lompo'e sudah berjalan dengan baik. Adapun yang dilakukan Pemerintah dengan memberikan beberapa bantuan kepada masyarakat, kemudian masyarakat memanfaatkan bantuan yang diberikan untuk mendapatkan penghasilan. Namun ada beberapa masyarakat yang mendapatkan bantuan tidak sesuai dengan keahliannya sehingga bantuan yang diberikan dijual . Adapun pengentasan kemiskinan dalam ekonomi Islam menurut Yusuf Qardhawi

bertumpu pada instrumen bekerja, pemberian zakat, dan jaminan negara dari beberapa sumber.

B. Saran

1. Bagi masyarakat yang memperoleh bantuan dari pemerintah baik berupa modal usaha atau peralatan usaha hendaknya bisa memanfaatkan bantuan yang diberikan dengan baik agar dapat memberdayakan dirinya sehingga tujuan dari pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan dapat terwujud.
2. Bagi pemerintah kiranya dapat memberikan pelatihan-pelatihan secara merata sesuai dengan jenis bantuan yang diterima oleh masyarakat sehingga bantuan yang diterima dapat digunakan sebaik mungkin sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tidak memanfaatkan bantuan yang diterima dengan baik.
3. Saran bagi peneliti selanjutnya
agar lebih baik, peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian lebih lanjut dengan melibatkan variabel lain yang berhubungan dengan penanggulangan kemiskinan untuk mengukur seberapa besar peran Pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Buku

Ahmad al- Sarkhasi Muhammad bin, *Al mabsut kitabuzzakat bab ushur aradhin as sharkhasi*, Beirut: Dar al-Marifah, Jil.3, 1993.

Arabi al-Qurawi al Muhammad, *al-khulashah al-Fiqhiyyah' Ala Madhab al- Saddah al-Malikiyyah*, Beirut: Dar al-Kutub al- Imiyyah, TT.

Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)

Bungin, M. Burhan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Edisi Kedua* (Kencana)

Christine Daymon dan Immy Holloway, *Metode-Metode Riset Kualitatif dalam Public Relations dan Marketing Communications* (Jakarta: Bentang Pustaka, 2007)

Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)

Esti Ismayanti, *Metode Penelitian Bahasa dan Sastra* (Cet. IV; Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012)

H Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*, Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018.

Haidir, dan Salim, *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan , dan Jenis*, Jakarta: Kencana, 2019.

Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : CV Alfabeta, 2011)

Immy, Holloway dan Christine Daymon, *Metode-Metode Riset Kualitatif dalam Public Relations dan Marketing Communications*, Jakarta: Bentang Pustaka, 2007.

Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktik)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)

Kementerian Agama RI, *AT-THAYYIB Al-Qur'an Transliterate kata dan terjemahan Per Kata* (ciputat : Cipta Segera, 2011)

- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Cet. VII; Jakarta: Bumi Aksara, 2004)
- Muqouwis, Muhammad, *pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan konsep & aplikasi dari PKMD hingga desa siaga*, bandar lampung: yayasan bina masyarakat mandiri, 2017.
- Nofriansyah, Deny , *penelitian kualitatif analisis kinerja lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan*, Yogyakarta: deepublish, 2018.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif di Lengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2005)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta Cet. XIX, 2014)
- Suhaimi, H. Ahmad, *pengembangan & pemberdayaan masyarakat konsep pembangunan partisipatif wilayah pinggiran dan desa*, Yogyakarta: deepublish, 2016.
- Suryawati, *Teori Ekonomi Mikro.UPP. AMP YKPN*, Yogyakarta: Jarnasy, 2004.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi Parepare: STAIN Parepare, 2013.
- Ulwan, Abdullah Nashih, *Zakat menurut 4 Mazhab*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Wargadinata, wildana, *Islam & pengentasan Kemiskinan*, Malang, UIN-Maliki Press, 2011.

Skripsi/Jurnal

- Aneta, Asna, implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP) di kota gorontalo, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. I No. 1, Thn 2010.

Apriyanti, Liyana, Analisis program pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan di kota semarang, Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi universitas Diponegoro: semarang, 2011.

Iqbal, Muhammad, “konsep pengentasan kemiskinan dalam ekonomi islam”, *jurnal ilmiah*, 2017.

Iqbal, Muhammad, “*Peranan Pemerintah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kota Jambi*” skripsi: program studi ekonomi syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2018.

Janambani, Aipnus, Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Di Kelurahan Muja Muja Kecamatan Ambulharjo Yogyakarta skripsi Sarjana; Program Studi Ilmu Sosiatri/Pembangunan Sosial Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (APMD) Yogyakarta: 2018.

Nurwati, Nunung, *Kemiskina :Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan*, Jurnal Kependudukan Padjadjaran, Vol.10, No.1, Januari 2008.

Rina, Octaviani, Fredian Tonny Nasdian, dan Jenal Abidin¹, Penanggulangankemiskinan melalui pengembangan pertanian di kabupaten Bogor , studi kasus di kecamatan Pemijahan dan Leuwiliang, *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, Vol. 5 No. 2, Oktober 2013.

Subiyana, dkk, “implementasi program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan dalam penanggulangan kemiskinan”, *Jurnal Of Management*, vol. 2 , no. 2, maret 2016.

Sumber Internet

<https://www.banjarsari-labuhanhaji.desa.id/artikel/2020/4/14/kriteria-fakir-miskin-dan-orang-tidak-mampu-menurut-kemensos>, (di akses tanggal 3 april 2021, jam 20.13).

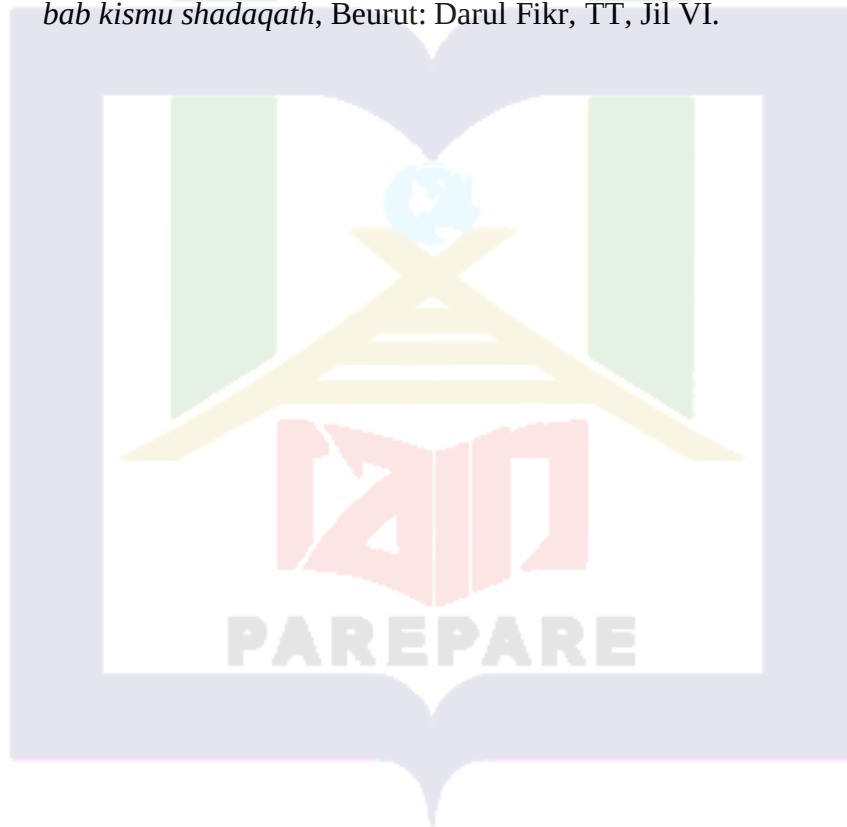
<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj0nP2p43uhVNfisKHbFZDZIQFjAAegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Ffontar.ui.ac.id%2Ffile%3Ffile3Ddigital%2F131538->

[T%2B27584Strategi%2BuntukTinjauan%2Bliteratur.pdf&usg=AOvVaw1AaenykicLsrEElgBl8xyr](#) (diakses pada tanggal 16 februari 2021, 14.30)

https://www.kompasiana.com/amp/susanadevi/5c76fb1f43322f34bf2ed664/basmimental-miskin-untuk-putuskan-rantai-kemiskinan-diindonesia#aoh=16202255293953&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=Dari%20%251%24s, (diakses tanggal 5 mei 2021, 22.49)

Muflih , Al Maqdisi Abu abdillah Muhammad Ibn. *Kitab Al Furu' bab dzikru ashnaf ahli zakah*, Asyarh al kabir, Asyarh al kabir ibnu qudamah juz 2.

Muhyiddin, al-Nawawi Abu Zakariya, *Al majmu' Syarh al muhazzab kitabuzzakah bab kismu shadaqath*, Beirut: Darul Fikr, TT, Jil VI.





	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENELITIAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA :SITTI HAJRA
 NIM :17.2400.100
 FAKULTAS :EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 PRODI :EKONOMI SYARIAH
 JUDUL :PENANGGULANGAN KEMISKINAN: ANTARA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DI KECAMATAN BACUKIKI KOTA PAREPARE (PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM)

Pertanyaan kepada masyarakat Kelurahan Lompoe Kecamatan Bacukiki penerima program bantuan dan Staff Badan Pemberdayaan Masyarakat

1. program bantuan apa yang ibu/bapak dapatkan dari Pemerintah ?
2. apa manfaat yang ibu dapatkan dari bantuan yang diberikan ?
3. apakah ibu/bapak mengikuti pelatihan sebelum menerima bantuan alat ?
4. apakah bantuan yang diberikan dipergunakan sesuai peruntukannya ?
5. dimana pelaksanaan pelatihannya?
6. apa saja pembelajaran yang di dapatkan dari pelatihan?
7. apa persyaratan yang diperlukan untuk mendapat bantuan ini ?
8. seberapa besar bantuan ini bisa meningkatkan taraf hidup dan peningkatan pendapatan?
9. bagaimna kriteria masyarakat yang mendapat bantuan rumah

10. apakah ada pelatihan yang diberikan sebelum menerima bantuan?
11. dimana pelaksanaan pelatihan warga yang menerima bantuan?
12. apa saja bantuan-bantuan alat yang diterima masyarakat?
13. siapa-siapa penerima bantuan di kelurahan Lompo'e
14. apa saja persyaratan yang diperlukan ?
15. Bagaimana dampaknya program ini terhadap peningkatan kehidupan masyarakat (membantu atau tidak) ?
16. apakah program ini sudah tepat sasaran, betul-betul masyarakat yang kurang mampu yang menerimanya?

Parepare, November 2021

Mengetahui,



DATA MENTAH PENELITIAN

Penanggulangan Kemiskinan: antara Pemerintah dan Masyarakat di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare (Perspektif Ekonomi Islam)

Wujud penanggulangan kemiskinan

1. program bantuan apa yang ibu/bapak dapatkan dari Pemerintah ?

Jawaban: Bantuan alat mesin jahit, alat masakan, alat salon/ tata rias, alat pertukangan kayu/pertukangan batu, perbaikan rumah, dan bantuan modal usaha.

2. apa manfaat yang ibu dapatkan dari bantuan yang diberikan ?

Jawaban: memberikan manfaat, karna selain bisa di pakai untuk bekerja dan sedikit bisa membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

3. apakah ibu/bapak mengikuti pelatihan sebelum menerima bantuan alat ?

Jawaban: iya nak

4. apakah bantuan yang diberikan dipergunakan sesuai peruntukannya ?

Jawaban: iya nak saya pakai bekerja kemarin bantuan yang di kasika

5. Bagaimana dampaknya program ini terhadap peningkatan kehidupan masyarakat(membantu atau tidak) ?

Jawaban: Membantu

6. seberapa besar bantuan ini bisa meningkatkan taraf hidup dan peningkatan pendapatan?

Jawaban: alhamdulillah, ada peningkatan dalam usahaku karna alat yang di kasi saya pakai bekerja/ menjual.

7. apakah bantuan yang diterima sudah tepat sasaran

Jawaban: alhamdulillah sesuai alat bantuan yang dikasika

Faktor mempengaruhi penanggulangan kemiskinan

1. apakah ada pelatihan yang diberikan sebelum menerima bantuan?

Jawaban: ada

2. apa saja pembelajaran yang di dapatkan dari pelatihan?

Jawaban: banyak, kan saya dikasika bantuan alat masak kemarin, jadi di ajarkankanki buat makanan, kue, dll

3. diamana pelatihan penerima bantuan dilaksanakan?

Jawaban: BLK/ DISNAKER

4. apakah bantuan alat yang diberikan semuanya diberikan pelatihan?

Jawaban: tidak, tergantung dana yang tersedia dari SKPD, kalauada dananya dilakukan pelatihan, kalau tdk ada tidak dilakukanki pelatihan

implementasi peran pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan

1. apa persyaratan yang diperlukan untuk mendapat bantuan ini?

Jawaban: KTP, KK, dan Jenis Usaha

2. apa saja bantuan-bantuan alat yang diterima masyarakat dari Pemerintah?

Jawaban: Perbaikan rumah, Bantuan alat usaha dan penguatan modal usaha

3. dimana pelaksanaan pelatihan warga yang menerima bantuan?

Jawaban: BLK/ DISNAKER

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Dra. Hj. Hasnah Daud
Alamat : BTN Tiruutama
Pekerjaan :

Menerangkan bahwa

Nama : Sitti Hajra
NIM : 17.2400.100
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Penanggulangan kemiskinan: antara Pemerintah dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare "

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, November 2021


Dra. Hj. HASNAH DAUD

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Hj. Nori
Alamat :
Pekerjaan : Perubuat kue

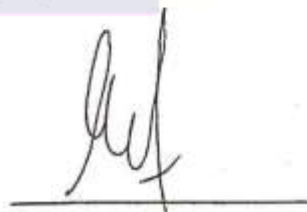
Menerangkan bahwa

Nama : Sitti Hajra
NIM : 17.2400.100
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Penanggulangan kemiskinan: antara Pemerintah dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, November 2021



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Surah

Alamat :

Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa

Nama : Sitti Hajra

NIM : 17.2400.100

Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Penanggulangan kemiskinan: antara Pemerintah dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare "

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, November 2021



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Isiah (penerima perbaikan rumah)
Alamat :
Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa

Nama : Sitti Hajra
NIM : 17.2400.100
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Penanggulangan kemiskinan: antara Pemerintah dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare "

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, November 2021



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Haswiah (penerimo Perbatan rural)
Alamat :
Pekerjaan : IRT

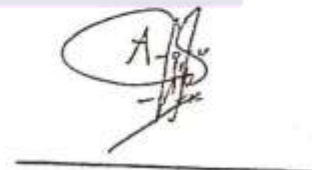
Menerangkan bahwa

Nama : Sitti Hajra
NIM : 17.2400.100
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Penanggulangan kemiskinan: antara Pemerintah dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare "

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, November 2021



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Hasniah (penerimaan Perbaikan rumah)

Alamat :

Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa

Nama : Sitti Hajra

NIM : 17.2400.100

Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Penanggulangan kemiskinan: antara Pemerintah dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare "

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, November 2021



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : MASDAWATI, SE
 Alamat : JL. LILU BULOE WKKKE'E
 Pekerjaan/Jabatan : STAFF PEMB. MASYARAKAT
 KANTOR KEC. BACUKIKI

Menerangkan bahwa

Nama : Sitti hajra
 NIM : 17.2400.100
 Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Ekonomi Ekonomi Syariah
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Penanggulangan Kemiskinan: Antara Pemerintah dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare (Perspektif Ekonomi Islam)

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,


MASDAWATI, SE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : EDY SUTRINO ARIEF

Alamat : PERUMPAI, WETAN, KEC. BACUKIKI

Pekerjaan/Jabatan : STB KEC. BACUKIKI

Menerangkan bahwa

Nama : Sitti hajra

NIM : 17.2400.100

Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Ekonomi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Penanggulangan Kemiskinan: Antara Pemerintah dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare (Perspektif Ekonomi Islam)

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,


EDY SUTRINO

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Latatang
Alamat :
Pekerjaan : Masengsong

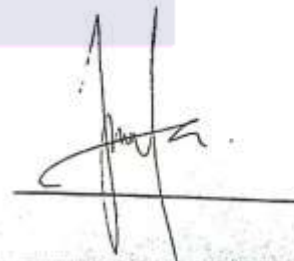
Menerangkan bahwa

Nama : Sitti Hajra
NIM : 17.2400.100
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Penanggulangan kemiskinan: antara Pemerintah dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, November 2021



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Haeruddin
Alamat :
Pekerjaan : Tubang kayu

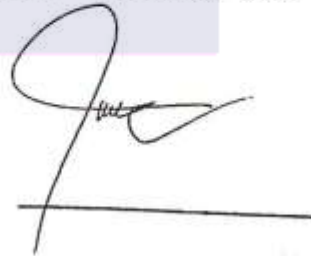
Menerangkan bahwa

Nama : Sitti Hajra
NIM : 17.2400.100
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Penanggulangan kemiskinan: antara Pemerintah dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare "

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, November 2021



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Rannu
Alamat : Rude'e
Pekerjaan : ~~Pude'e~~ menjahit

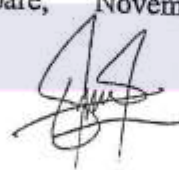
Menerangkan bahwa

Nama : Sitti Hajra
NIM : 17.2400.100
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Penanggulangan kemiskinan: antara Pemerintah dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare "

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, November 2021



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Sarira
Alamat : karup. Baru laberupa
Pekerjaan : Menjahit

Menerangkan bahwa

Nama : Sitti Hajra
NIM : 17.2400.100
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Penanggulangan kemiskinan: antara Pemerintah dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare "

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, November 2021



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Suarni
Alamat :
Pekerjaan : Wakil ketua 3 Perencanaan Baznas

Menerangkan bahwa

Nama : Sitti Hajra
NIM : 17.2400.100
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Penanggulangan kemiskinan: antara Pemerintah dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, November 2021



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Hasniah.
 Alamat : Jl. Lusung No 43.
 Pekerjaan : Sty kel. longot. (Pembangunan Parepare).

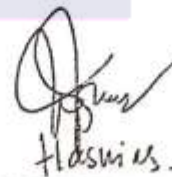
Menerangkan bahwa

Nama : Sitti Hajra
 NIM : 17.2400.100
 Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Penanggulangan kemiskinan: antara Pemerintah dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, November 2021


 Hasniah.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Rosdiana, S.E
Alamat : Gelora mandiri no.1 Parepare
Pekerjaan : Pelayanan umum dan pemberdayaan masyarakat

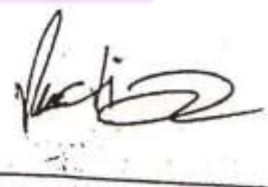
Menerangkan bahwa

Nama : Sitti Hajra
NIM : 17.2400.100
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Penanggulangan kemiskinan: antara Pemerintah dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare "

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, November 2021



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Rasmawati

Alamat :

Pekerjaan : Salon

Menerangkan bahwa

Nama : Sitti Hajra

NIM : 17.2400.100

Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Penanggulangan kemiskinan: antara Pemerintah dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, November 2021



SURAT KETERANGAN PENELITIAN DARI KAMPUS



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakri No. 8 Sorsang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.4401/In.39.8/PP.00.9/10/2021
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : SITI HAJRA
Tempat/ Tgl. Lahir : PAREPARE, 05 MARET 1998
NIM : 17.2400.100
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/EKONOMI SYARIAH
Semester : IX (SEMBILAN)
Alamat : JL. LAMMIDE WEKKE'E, KELURAHAN LOMPOE,
KECAMATAN BACUKIKI, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PENANGGULANGAN KEMISKINAN: ANTARA PEMERINTAH DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN BACUKIKI KOTA PAREPARE (PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Oktober sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

21 Oktober 2021

Dekan,



Emil
Mohammad Kamel Zubair

SURATNELITI

SRN IP0000729



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 731/IP/DPM-PTSP/10/2021

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 45 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA NAMA UNIVERSITAS/ LEMBAGA Jurusan ALAMAT UNTUK	: SITTI HAJRA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE EKONOMI SYARIAH JL. LAMMIDE WEKKE'E PAREPARE : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut : JUDUL PENELITIAN : PENANGGULANGAN KEMISKINAN ANTARA PEMERINTAH DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN BACUKIKI KOTA PAREPARE (PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM) LOKASI PENELITIAN : KECAMATAN BACUKIKI KOTA PAREPARE LAMA PENELITIAN : 25 Oktober 2021 s.d 25 November 2021 a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan
--	---

Dikeluarkan di: Parepare
Pada Tanggal : 26 Oktober 2021
**PIL. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Dra. Hj. AMINA AMIN
Pangkat : Pembina Utama Muda, (IV/c)
NIP : 19630608 196803 2 012

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSE
- Dokumen ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan terdapat di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QRCode)



Baku
Sarifika
Elektronik



SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN BACUKIKI
Jalan Jend. Muh. Yusuf Nomor Telp. (0421) 21509
P A R E P A R E

Kode Pos : 91125

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 070 / 223 / Bacukiki

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : SAHARUDDIN, SE
Nip : 19710617 199203 1 006
Jabatan : Camat Bacukiki

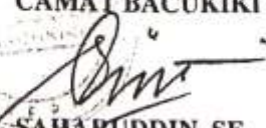
Menerangkan bahwa :

Nama : SITTI HAJRA
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 05 Maret 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/Pendidikan : Mahasiswa / S1
Program Studi : Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Lammide Wekke'e Kel. Lompoe Kec. Bacukiki Kota Parepare
Judul Penelitian : Penanggulangan Kemiskinan antara Pemerintah dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare (Perspektif Ekonomi Islam)

Benar Mahasiswi tersebut telah selesai melakukan penelitian/wawancara di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare terhitung mulai tanggal 25 Oktober 2021 s.d 25 November 2021, Berdasarkan Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare Nomor : 731/IP/DPM-PTSP/10/2021 Tanggal 26 Oktober 2021.

Demikian surat keterangan ini buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 14 Desember 2021
CAMAT BACUKIKI


SAHARUDDIN, SE

Pangkat : Pembina
Nip. 19710617 199203 1 006

DOKUMENTAS



Wawancara dengan Staff Pemberdayaan Masyarakat di kantor Kecamatan Bacukiki



Foto dengan beberapa staff Pemberdayaan Masyarakat dan Bapak Camat Bacukiki



Pelatihan Menjahit



Pelatihan Tata Rias



Pelatihan tata boga di Baruga Kelurahan Lompo'e



Wawancara dengan H. Hasnah Daud selaku pembina Pelatihan Menjahit /Tata Rias



Wawancara dengan wakil 3 Perencanaan Baznas Kota Parepare



Wawancara dengan pekerja meubel, penerima bantuan peralatan pertukangan



Wawancara dengan salah satu penerima bantuan



Wawancara kepada salah satu penerima bantuan



Wawancara kepada salah satu penerima bantuan



Foto Rumah bantuan



Foto salah satu rumah masyarakat penerima bantuan Rumah, dan masih dalam proses pembangunan.



Foto perbaikan rumah warga, bantuan dinding dan atap rumah



Foto bantuan mesin usaha menjahit



Foto bantuan alat pertukangan

BIODATA PENELITIAN



Sitti Hajra, lahir di Parepare tanggal 5 Maret 1998, anak ke empat dari lima bersaudara dari pasangan H. Daeng.Tombong dan Mirna yang bertempat tinggal di Wekke'e Kota Parepare Sulawesi Selatan. Peneliti mulai masuk pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 37 Parepare pada tahun 2004-2010, Sekolah Menengah Pertama (SMPN) 10 Parepare pada tahun 2010-2013, Sekolah menengah Atas (SMAN) 1 Parepare pada tahun 2013-2016. Peneliti melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare kemudian beralih menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare mengambil program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Peneliti menyelesaikan studi dengan judul “Penanggulangan Kemiskinan: Antara Pemerintah dan Masyarakat di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare (Perspektif Ekonomi Islam).